SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
10. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
11. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Hak akses arsip adalah pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
13. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan negara dan pribadi.
14. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
   a. mendorong Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktif ;

b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
c. tersedianya informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan

BAB III
ASAS

Pasal 3

(1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
(2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
(3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB IV
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES

Bagian Kesatu
Klasifikasi Keamanan

Pasal 4

(1) Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 4 (empat) kategori keamanan yang meliputi:
a. biasa/umum/terbuka;
b. terbatas;
c. rahasia; dan
d. sangat rahasia.

(2) Biasa/umum/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

(3) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
(4) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
(5) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah antara lain:
a. Arsip dinamis yang meliputi urusan pemerintahan daerah;
b. Arsip dinamis yang meliputi urusan pertanian;
c. Arsip dinamis yang meliputi urusan perdagangan;
d. Arsip dinamis yang meliputi urusan perhubungan;
e. Arsip dinamis yang meliputi urusan kelautan dan perikanan;
f. Arsip dinamis yang meliputi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. Arsip dinamis yang meliputi urusan lingkungan hidup;
h. Arsip dinamis yang meliputi urusan perindustrian;
i. Arsip dinamis yang meliputi urusan penanggulangan bencana;
j. Arsip dinamis yang meliputi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. Arsip dinamis yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. Arsip dinamis yang meliputi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;
m. Arsip dinamis yang meliputi urusan sosial;
n. Arsip dinamis yang meliputi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
o. Arsip dinamis yang meliputi urusan kesehatan;
p. Arsip dinamis yang meliputi urusan pendidikan dan kebudayaan;
q. Arsip dinamis yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga;
r. Arsip dinamis yang meliputi urusan energi dan sumber daya mineral;
s. Arsip dinamis yang meliputi urusan kepegawaian;
t. Arsip dinamis yang meliputi urusan keuangan; dan
u. Arsip dinamis yang meliputi urusan non keuangan dan non kepegawaian, yaitu perencanaan, hukum, organisasi tata laksana, kearsipan, tata usaha kerumahtanggaan, humas, penelitian, pengkajian, pelatihan, perpustakaan, teknologi informatika dan telekomunikasi, persandian, dan pengawasan.

Pasal 6

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi:

a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang;
c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 7

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Perangkat Daerah yang meliputi:

a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;
b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
f. Arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
h. Arsip yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, dan
i. Daftar arsip rahasia.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 8

(1) Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 2 (dua) kategori hak akses yang meliputi:
    a. pengguna internal yaitu penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas internal; dan
    b. pengguna eksternal yaitu publik, pengawas eksternal, dan aparat penegak hukum.
(2) Setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
(3) Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 9

(1) Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.
(2) Pengaturan pengguna arsip dinamis serta sarana dan prasarana penyimpanan arsip sesuai dengan media arsip sebagaimana lampiran peraturan ini.
(3) Ketentuan tentang *backup* pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas.

Bagian Kedua
Penyampaian

Pasal 10

(1) Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana lampiran peraturan ini.
(2) Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

(1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
    b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
    c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
(3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
    b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 12

(1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
(2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 13

(1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
(2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat arsip dan *central file*.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

(1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
(2) Arsiparis/ pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
(3) Pejabat fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 15

(1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Bagian Arsip dan Pengelola Arsip Aktif di *central file* Perangkat Daerah.
(2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di pusat arsip dalam menetapkan hak akses arsip.
(3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di pusat arsip.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tabel Pengamanan arsip dinamis dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN E[illegible]KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

A. PETUNJUK PENGAMANAN ARSIP DINAMIS SESUAI DENGAN TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	*Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. *Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ *password* atau ID digital) 2. Penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan *Operating System* khusus atau aplikasi khusus 3. *Firewall* dan sistem- sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
3.	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	1. *Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	3. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut 4. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ *password* atau ID digital) 5. Penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual	4. Langkah-langkah keamanan dengan *Operating System* khusus atau aplikasi khusus 5. *Firewall* serta sistem- sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. *Firewall* adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan, dan Penegak Hukum	1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses 2. Penerapan kebijakan “Meja harus bersih”	1. *Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak- pihak eksternal	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/*password* atau ID digital) 2. Penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan *Operating System* khusus atau aplikasi khusus 3. Firewall dan sistem- sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

Catatan: Ketentuan tentang *backup* pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas.

B. PROSEDUR PENGIRIMAN INFORMASI

NO.	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, *password,* dan lain-lain.

NO.	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
3.	Rahasia	1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia. 5. Konfirmasi tanda terima. 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.	1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi.
4.	Sangat Rahasia	1. Menggunakan warna kertas yang berbeda. 2. Menggunakan amplop dobel bersegel. 3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan). 4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia.	1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi 4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

Catatan: Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SISTEM KLASIFIKASI DAN KEAMANAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	000	UMUM	Biasa / Terbuka	Eselon II,	Tidak memiliki	Sub Bagian Umum
2	000	Umum				
3	001	Lambang				
4	.1	Garuda				
5	.2	Bendera Kebangsaan				
6	.3	Daerah				
7	.31	Propinsi				
8	.32	Kabupaten				
9	.4	Bandir/Umbul-umbul				
10	002	Tanda Kehormatan/ penghargaan untuk Pegawai Lihat 861.1				
11	.1	Bintang				
12	.2	Satyalencana				
13	.3	Satyakarya Nugraha				
14	.4	Penghargaan Secara Adat				
15	.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)				
16	.6	Monumen				
17	003	Hari Raya/Besar				
18	.1	Nasional (17 Agustus,Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)				
19	.2	Hari Raya Keagamaan				
20	.3	Hari Ulangtahun / HUT (Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)				
21	.4	Hari-hari Besar Internasional				
22	004	Ucapan				
23	.1	Terimakasih				
24	.2	Selamat				
25	.3	Mohon diri				
26	.4	Belasungkawa				
27	.5	Ucapan lainnya				
28	005	Undangan				
29	006	Tanda Jabatan				
30	.1	Pamong praja				
31	.2	Pejabat lainnya				
32	.3	Tanda Pengenal				
33	010	URUSAN DALAM				
34	011	Gedung kantor/termasuk Instalasi prasarana fisik pamongpraja/kantor dinas				
35	.1	Listrik	Biasa / Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing
36	.2	Telepon				
37	.3	Otomasi			Perangkat Daerah	perangkat daerah

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
38	.4	Air Minum			Perangkat Daerah	perangkat daerah
39	.5	Hidrant				
40	.6	Alarm				
41	.7	Internet				
42	012	Rumah Dinas				
43	.1	Tanah untuk Rumah Dinas				
44	.2	Perabot Rumah Dinas				
45	.3	Rumah Dinas Golongan I				
46	.4	Rumah Dinas Golongan II				
47	.5	Rumah Dinas Golongan III				
48	.6	Rumah/Bangunan Lainnya				
49	.7	Rumah Pejabat Negara				
50	013	Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)				
51	014	Rumah Susun/Apartemen				
52	015	Peminjaman sarana dan prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop, dll)				
53	016	Pengurusan Kendaraan Dinas				
54	017	Keamanan/Ketertiban Kantor				
55	018	Kebersihan Kantor				
56	019	Protokol				
57	.1	Upacara Bendera				
58	.2	Tata Tempat				
59	.21	Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden				
60	.3	Audiensi/Menghadap Pimpinan				
61	.31	Alamat-alamat Kantor dan Pejabat				
62	.32	Bandir/Umbul-umbul/Spanduk				
63	.4	Penerimaan Tamu				
64	.5	Kerjasama				
65	020	BARANG DAN JASA				
66	021	Penawaran				
67	.1	Penawaran Barang				
68	.2	Penawaran Jasa				
69	022	Barang				
70	.1	Barang Bergerak (Alat Angkutan)				
71	.2	Barang Tidak Bergerak (ATK, Mesin Kantor dan Perabot Kantor)				
72	023	Jasa				
73	025	Pakaian Dinas				
74	026	Senjata				
75	027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukkan lelang, dsb.	Terbatas	Eselon II,		ULP dan di
76	.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwijzing,		Eselon III,		Sub Bagian
77	.2	SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran		Eselon IV		Perencanaan dan Keuangan masing-masing Perangkat Daerah
78	.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)				
79	.4	Serah terima pekerjaan				
80	.5	Pemeriksaan pekerjaan				
81	.6	Perpanjangan waktu/force majoure				
82	.7	Denda				
83	.8	Sanggahan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
84	.9	Pemeliharaan barang/jasa				
85	028	Inventaris	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV		Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah
86	.1	Pendataan Barang Milik Negara				
87	.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara				
88	.3	Penghapusan Barang Milik Negara				
89	030	KEKAYAAN DAERAH				
90	031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)				
91	032	Barang-barang tidak bergerak(gedung, asrama, monumen/bangunan bersejarah,				
92	033	Tanaman				
93	034	Alat-alat berat				
94	035	Hewan				
95	036	Barang persediaan dalam gudang				
96	037	Alat pengangkut (Darat, Laut, Udara)				
97	038	Peralatan Pabrik, Laboratorium				
98	039	Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)				
99	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI	Biasa/Terbuka	Eselon II,	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
100	041	Perpustakaan				
101	.1	Pameran Bahan Perpustakaan				
102	.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)				
103	.3	Sirkulasi/Layanan				
104	.31	Keanggotaan				
105	.32	Peminjaman dan Pengembalian				
106	.4	Deposit				
107	.5	Pemeliharaan, Pelestarian/Alih Media				
108	.6	Pembinaan Perpustakaan				
109	.61	Bantuan Buku, Rak				
110	.7	Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan				
111	.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)				
112	.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar perpustakaan				
113	.10	Taman Bacaan Masyarakat				
114	042	Dokumentasi				
115	043	Kunjungan ke Perpustakaan				
116	045	Kearsipan				
117	.1	Pola Klasifikasi				
118	.2	Akuisisi Arsip				
119	.3	Penyusutan Arsip				
120	.31	Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
121	.32	Penilaian Arsip				
122	.33	Pemindahan Arsip				
123	.34	Penyerahan Arsip				
124	.35	Pemusnahan Arsip				
125	.36	Berita Acara Penyusutan Arsip				
126	.37	Daftar Pertelaan				
127	.4	Pembinaan Kearsipan				
128	.41	Pengawasan				
129	.42	Bimbingan Kearsipan				
130	.5	Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
131	.51	Fumigasi dan Termit Control				
132	.52	Laminasi				
133	.53	Alih Media				
134	.6	Layanan				
135	.7	Pemasyarakatan				
136	.71	Pameran				
137	.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip				
138	.73	Sosialisasi Kearsipan				
139	.8	Pengembangan Sistem				
140	.81	Sistem Kearsipan				
141	.82	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan				
142	.9	Pengawetan				
143	046	Sandi	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
144	047	Telegram, Telex, Radio, ISB				
	048	Data Elektronik				
145						
146	050	PERENCANAAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan,Sub Bagian Perencanaan di masing-masing perangkat daerah
147		Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD				
148	.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)				
149	.11	RENSTRA (Rencana Strategi)				
150	.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)				
151	.13	RENSTRA BAPPEDA				
152	.2	Program Nasional				
153	.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)				
154	.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)				
155	.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)				
156	.24	Rencana Kerja SKPD				
157	.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan				
158	.26	Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi				
159	.27	Nota keuangan				
160	.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan,Sub Bagian Perencanaan di masing-masing perangkat daerah
161	.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)				
162	.3	Repelita				
163	.31	Pelita Daerah				
164	.32	Bantuan Pembangunan Daerah				
165	.33	Bappeda				
166	051	Laporan				
167	.1	Laporan berkala				
168	.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				
169	052	Evaluasi				
170	.1	Evaluasi Rencana Strategis				
171	.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				
172	.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah				
173	.13	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota				
174	.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
175	053	Proyek Bidang Pemerintahan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
176	.1	Bidang Politik				
177	.2	Bidang Keamanan dan Ketertiban				
178	.3	Bidang Kesejahteraan Rakyat				
179	.4	Bidang Perekonomian				
180	.5	Bidang Pekerjaan Umum				
181	.6	Bidang Pengawasan				
182	.7	Bidang Kepegawaian				
183	.8	Bidang Keuangan				
184	060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
185	.1	Program Kerja				
186	061	Organisasi				
187	.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja				
188	.2	Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai				
189	062	Organisasi Badan Non Pemerintah				
190	063	Organisasi Badan Internasional				
191	064	Organisasi semi pemerintah				
192	065	Ketatalaksanaan				
193	.1	Tata Naskah Dinas				
194	.2	Stempel dinas dan stempel jabatan				
195	.3	Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah				
196	.4	Alamat-alamat kantor dan pejabat				
197	.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut				
198	066	Tata Hubungan Kerja				
199	067	Standart Operasional Prosedur				
200	068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan				
201	069	Analisis Jabatan				
202	.1	Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Struktual dan Fungsional				
203	.2	Uraian Jabatan				
204	070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
205	071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan				
206	072	Pengembangan				
207	.1	Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)				
208	.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)				
209	.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Cluster, Kab/Kota, desa, inovatif				
210	.4	Inkubator Teknologi dan Bisnis				
211	.5	Pameran produk inovasi/Ristek				
212	.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)				
213	.7	Raptek (Penerapan Iptek)				
214	.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)				
215	073	Kajian				
216	.1	Kajian Strategis / Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)				
217	.2	Seminar				
218	.3	Workshop				
219	.4	Rapat Koordinasi/Rapat Teknik				
220	.5	Lokakarya				
221	.6	Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian				
222	074	Kerjasama Penelitian				
223	.1	Instansi Pemerintahan Pusat/Daerah				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
224	.2	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta				
225	.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat				
226	.4	Lembaga Internasional				
227	075	Perekayasaan				
228	076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)				
229	077	Publikasi Ilmiah				
230	.1	Jurnal Ilmiah				
231	080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI				
232	081	Gubernur				
233	082	Bupati/Walikota				
234	083	Komponen Eselon Lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)				
235	084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)				
236	085	Internasional di Dalam Negeri				
237	086	Internasional di Luar Negeri				
238	090	PERJALANAN DINAS	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing perangkat daerah
239	091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah				
240	092	Perjalanan Menteri ke Daerah				
241	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)				
242	094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas				
243	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah				
244	096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri				
245	097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri				
246	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri				
247	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri				
248	100	PEMERINTAHAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	101	GDN (Gerakan Disiplin Nasional)				
249						
250	130	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
251	.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota				
252	.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)				
253	.03	Monografi				
254	.04	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				
255	.1	Koordinasi				
256	.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah				
257	.12	Instansi Vertikal				
258	.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)				
259	131	Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhantian,				
260	132	Wakil Bupati/Walikota, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,				
261	133	Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan				
262	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida				
263	.1	Musppida				
264	.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)				
265	.3	Forum Koordinasin Lainnya				
266	.4	Kerjasama Antar Kabupaten/Kota				
267	135	Pembentukan Daerah				
268	.1	Pembentukan Daerah Otonom				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
269	.2	Pembentukan Wilayah				
270	.3	Perubahan Batas Wilayah				
271	.4	Pemekaran Wilayah				
272	.5	Permasalahan Batas Wilayah				
273	.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota				
274	.7	Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan				
275	136	Pembagian Wilayah	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
276	137	Penyerahan Urusan				
277	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan				
278	.1	Pembentukan Kecamatan				
279	.2	Pemekaran Kecamatan				
280	.3	Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan				
281	.4	Pemindahan Ibu kota Kecamatan				
282	.5	Laporan Kecamatan				
283	.6	Sambutan/Pengarahan/Amanat				
284	.7	Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren				
285	140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV,	Tidak memiliki dampak	Bagian Pemerintahan,
286	141	Pamong Desa, Meliputi Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian				
287	.1	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Desa				
288	.2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa				
289	142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan (APBDes/Kel)		Kepala Desa, Sekretaris Desa	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A, Desa
290	143	Kekayaan Desa : Bondo desa, tanah bengkok dll				
291	144	Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD				
292	145	Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll				
293	146	Kewilayahan				
294	.1	Pembentukan Desa/Kelurahan				
295	.2	Pemekaran Desa/Kelurahan				
296	.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan				
297	.4	Perubahan Nama Desa/ Kelurahan				
298	.5	Permasalahan Batas Desa/Kelurahan				
299	.6	Penyatuan Desa/Kelurahan				
300	.7	Penghapusan Desa/ Kelurahan				
301	8	Kerjasama Antar Desa/Kelurahan				
302	147	RT-RW				
303	148	Perangkat Kelurahan				
304	.1	Lurah				
305	.2	Sekretaris Kelurahan				
306	.3	Staff Kelurahan				
307	149	Dewan Kelurahan				
308	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan
309	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
310	171	Keanggotaan				
311	.1	Pencalonan				
312	.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah				
313	.3	Pelanggaran				
314	.4	Pemberhentian Antar waktu				
315	.41	Meninggal Dunia				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
316	.42	Mengundurkan Diri				
317	.43	Diberhentikan				
318	.5	Alat Kelengkapan Dewan				
319	.51	Pimpinan				
320	.52	Badan Musyawarah				
321	.53	Komisi				
322	.54	Badan Legislasi Daerah				
323	.55	Badan Anggaran				
324	.56	Badan Kehormatan				
325	.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)				
326	172	Persidangan				
327	.1	Rapat-rapat				
328	.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa				
329	.12	Rapat Pimpinan DPRD				
330	.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan				
331	.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi				
332	.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan
333	.16	Rapat Fraksi				
334	.2	Fraksi				
335	.3	Tata tertib				
336	.4	Kode etik				
337	.5	Reses				
338	.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan				
339	.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi				
340	173	Kesejahteraan				
341	.1	Keuangan				
342	.2	Penghargaan				
343	174	Hak				
344	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota				
345	180	HUKUM	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
346	.1	Konstitusi				
347	.11	Dasar Negara				
348	.12	Undang Undang Dasar				
349	.13	Undang Undang				
350	.14	Perauran Pemerintah				
351	.15	Keppres/Perpres/Inpres				
352	.16	Kepmen/Permen/Inmen				
353	.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi, Perda, Kepgub / Pergub / Ingub				
354	.18	Perundangan Tingkat Kabupaten, Meliputi Perda, KepBup / KepWal / PerBup				
355	.19	Perundangan Tingkat Desa Meliputi, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa				
356	181	Perdata	Rahasia	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
357	.1	Tanah				
358	.2	Rumah				
359	.3	Utang/Piutang				
360	.31	Gadai				
361	.32	Hipotik				
362	.4	Notariat				
363	182	Pidana				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
364	.1	Tindak Pidana Hukum				
365	.2	Tindak Pidana Khusus				
366	.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				
367	183	Peradilan				
368	.1	Jenis-Jenis Peradilan				
369	.11	Peradilan Umum				
370	.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama				
371	.112	Peradilan Tinggi				
372	.113	Mahkamah Agung				
373	.12	Peradilan Agama Islam				
374	.121	Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama				
375	.122	Peradilan Tinggi Agama Islam				
376	.123	Makhamah Islam Agung	Rahasia	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
377	.13	Peradilan Militer				
378	.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama				
379	.132	Makhamah Militer Tinggi				
380	.133	Makhamah Militer Agung				
381	.14	Peradilan Tata Usaha Negara				
382	.141	Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama				
383	.142	Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara				
384	.143	Makhamah Tata Usaha Negara Agung				
385	.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi				
386	.16	Peradilan Hak Asasi Manusia				
387	.17	Mahkamah Konstitusi				
388	.18	Komisi Yudisial				
389	.19	Ombustmen				
390	.2	Upaya Hukum				
391	.21	Banding				
392	.22	Kasasi				
393	.23	Derden Verset				
394	.24	Peninjauan Pembeli				
395	.25	Grasi, amnesti,abolisi				
396	.23	Eksekusi				
397	.24	Pembinaan Hukum, meliputi kadarkum				
398	.25	Bantuan Hukum, meliputi LBH				
399	184	Hukum Internasonal				
400	185	Imigrasi				
401	.1	Visa				
402	.2	Paspor				
403	.3	Exit				
404	.4	Reentry				
405	.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara				
406	186	Kepenjaraan				
407	.1	Registrasi Narapidana				
408	.2	Pembinaan Narapidana				
409	.3	Pembebasan Narapidana				
410	.4	Tahanan Titipan				
411	187	Kejaksaan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
412	.1	Penuntutan Umum				
413	.2	Penuntutan Khusus				
414	188	Hukum Adat				
415	.1	Tokoh Adat/Masyarakat				
416	189	Peraturan Perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
417	.1	MPR				
418	.2	Undang-undang				
419	.3	Peraturan TAP				
420	.31	Peraturan Pemerintah			kinerja Perangkat Daerah	
421	.32	Peraturan Menteri				
422	.33	Peraturan Lembaga Non Departemen				
423	.34	Peraturan Daerah				
424	.341	Peraturan Provinsi				
425	.342	Peraturan Kabupaten/Kota				
426	.4	Keputusan				
427	.41	Presiden				
428	.42	Menteri				
429	.43	Lembaga Non Departemen				
430	.44	Gubernur				
431	.45	Bupati/Walikota				
432	.5	Instruksi				
433	.51	Presiden				
434	.52	Menteri				
435	.53	Lembaga Non Departemen				
436	.6	Standar Operasional Prosedur	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Kepegawaian di Perangkat Daerah
437	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
438	191	Perwakilan Asing				
439	192	Tamu Negara				
440	193	Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing				
441	.1	ASEAN				
442	.2	Bantuan Luar Negeri/Hibah				
443	194	Perwakilan RI Diluar Negri				
444	195	PBB				
445	196	Laporan Luar Negeri				
446	200	POLITIK	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
447	201	Perencanaan Dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri				
448	.1	Pembinaan Dan Pemahaman Ideologi Negara				
449	.2	Kesatuan Bangsa				
450	.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk Laporannya				
451	.4	Keadaan Politik Luar Negeri				
452	.5	Evaluasi Dan Pegawasan Pembinaan Ipoleksosbut hankam				
453	.6	Orde Baru				
454	.7	Orde Reformasi				
455	202	Kebijaksanaan Umum				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
456	210	KEPARTAIAN				
457	211	Partai politik				
458	.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL				
459	.2	Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL				
460	.3	Pembinaan PARPOL	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
461	.4	Hasil Munas/Musda PARPOL				
462	.5	Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL				
463	.6	Data Inventaris Dan Keuangan PARPOL				
464	212	Partai/Organisasi Terlarang				
465	.1	Keputusan Pembubaran Partai/Organisai Terlarang				
466	.2	Daftar Dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisai Terlarang				
467	.3	Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili Bagi Anggota Partai/Organisasi Terlarang				
468	.4	Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang				
469	.5	Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisai Terlarang				
470	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
471	221	Pembentukan Organisasi				
472	.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga				
473	.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
474	.3	Program Kerja Organisasi				
475	.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota				
476	222	Pembinaan Organisasi				
477	.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya				
478	.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi				
479	223	Berdasarkan Perjuangan				
480	.1	Perintis Kemerdekaan				
481	.2	Angakatan 45				
482	.3	Veteran				
483	224	Berdasarkan Kekayaan				
484	.1	PEPABRI				
485	.2	Wredatama				
486	225	Berdasarkan Kerohanian				
487	226	Lembaga Adat				
488	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
489	231	Pembentukan Organisasi				
490	.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga				
491	.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
492	.3	Program Kerja Organisasi				
493	.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota				
494	232	Pembinaan Organisasi				
495	.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya				
496	.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi				
497	233	Ikatan Dokter Indonesia				
498	234	Persatuan Guru Republik Indinesia				
499	235	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia				
500	.1	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia				
501	236	Persatuan Advokat Indonesia				
502	237	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)				
503	238	Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
504	.1	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
505	.2	Korps Pegawai Republik Indonesia				
506	239	Jabatan Fungsional Lain				
507	.1	Arsiparis				
508	.2	Pustakawan				
509	240	ORGANISASI PEMUDA	Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
510	241	Pembentukan Organisasi				
511	.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga				
512	.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
513	.3	Program Kerja Organisasi				
514	.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota				
515	242	Pembinaan Organisasi				
516	.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya				
517	.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi				
518	243	Komite Nasional Pemuda Indonesia				
519	244	Organisasi Mahasiswa				
520	245	Organisasi Pelajar				
521	246	Gerakan Pewmuda Ansor				
522	247	Gerakan Pemuda Islam Indonesia				
523	248	Gerakan Pemuda Marhaenis				
524	260	ORGANISASI WANITA	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
525	261	Pembentukan Organisasi				
526	.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga				
527	.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
528	.3	Program Kerja Organisasi				
529	.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota				
530	262	Pembinaan Organisasi				
531	.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya				
532	.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi				
533	263	Dharma Wanita				
534	264	Persatuan Wanita Indonesia				
535	265	Pemberdayaan Perempuan (wanita)				
536	266	Kongres Wanita				
537	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	KPU
554	279	KPU/KPUD				
555	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA				
556	281	Pemantauan				
557	282	Pelanggaran				
558	283	Sengketa				
559	284	Panwaslu				
560	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terbatas	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
561	.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan				
562	.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan				
563	.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban				
564	.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan				
565	301	Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
566	302	Pengawasan Trantibum				
567	303	Penegakan Pelaksanaan Perda				
568	304	Pembinaan / Penyuluhan pelanggaran Perda				
569	305	Patroli Wilayah				
570	306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing				
571	.1	Pengamanan				
572	.2	Pengawalan				
573	307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan , ketentuan pelaksanaan dan pengawasan				
574	330	KEAMANAN	Terbatas	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV		Satuan Polisi Pamong Praja
575	331	Kepolisian				
576	.1	Polisi Pamong Praja				
577	332	Huru-Hara/Demonstrasi				
578	333	Senjata Api/Tajam				
579	334	Bahan Peledak				
580	335	Perjudian				
581	336	Surat-surat Kaleng				
582	337	Pengaduan Masyarakat				
583	338	Himbauan atau Larangan				
584	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
585	.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas				
586	341	Pembinaan dan Diklat				
587	.1	Pengangkatan / Pemberhentian anggota Linmas				
588	.2	Pendidikan/latihan Linmas				
589	.3	Pelatihan PAM Swakarsa				
590	.4	Pendidikan/Latihan MENWA				
591	342	Pengerahan dan pengendalian Linmas				
592	343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas				
593	.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas				
594	.2	Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas				
595	.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas				
596	.4	Penghargaan bagi anggota Linmas				
597	344	Data Linmas, MENWA, PAM Swankarsa				
598	.1	Linmas Lanjut Usia				
599	345	Orientasi Kesadaran Bela Negara				
600	346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas				
601	360	BENCANA	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
602	.1	Pelatihan				
603	.2	Surat Keputusan				
604	.3	Berita Acara				
605	361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami				
606	362	Banjir/Tanah Longsor				
607	363	Angin Topan				
608	364	Kebakaran				
609	.1	Pemadaman Kebakaran				
610	365	Kekeringan				
611	366	Posko Bencana				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
612	367	Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana				
613	368	MOU Pemerintah Pusat BNPB				
614	370	KECELAKAAN				
615	371	Latihan SAR				
616	372	Latihan Ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam				
617	373	Pelatihan managemen bagi pejabat				
618	374	Satkorlak dan Satlak PBP				
619	375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP				
620	376	Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran				
621	377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara				
622	378	Investigasi/ Penyelidikan Kecelakaan				
623	379	Asuransi kecelakaan				
624	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				
625	381	Perencanaan				
626	.1	Perencanaan Teknis				
627	.2	Rekomendasi				
628	382	Bantuan Bencana				
629	383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain				
630	384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi				
631	385	PUSDALOPS				
632	386	Kunjungan lapangan				
633	387	Relawan				
634	388	Laporan Bencana				
635	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN				
636	391	Instansi pemerintah Pusat				
637	392	Instansi pemerintah di daerah				
638	393	Lembaga International				
639	394	Lembaga non pemerintah nasional				
640	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon II,	Tidak memiliki	Dinas Sosial, Dinas
641	401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat		Eselon III,	dampak yang	
642	402	Keluarga Miskin		dan Eselon IV	mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Pemberdayaan Masyarakat Desa P3A, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
643	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN	Terbuka	Eselon II,	Tidak memiliki	Dinas Sosial, Dinas
644	411	Gotong-royong		Eselon III, dan	dampak yang	Pemberdayaan
645	.1	Swadaya gotong royong		Eselon IV,	mengganggu kinerja	Masyarakat dan
646	.11	Pembinaan		Kades	Perangkat Daerah	Desa dan P3A, Desa
647	.12	Pungutan				
648	.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)				
649	.3	Latihan kerja masyarakat				
650	.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
651	.5	Penyuluhan Masyarakat Desa				
652	.6	Kelembagaan Desa				
653	.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				
654	412	Perekonomian Desa				
655	.1	Produksi Desa				
656	.11	Pengolahan				
657	.12	Pemasaran				
658	.2	Pembiayaan Pembangunan Desa				
659	.21	Inventarisasi Data				
660	.22	Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan				
661	.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan				
662	.24	Bantuan/ Stimulasi/ADD				
663	.25	Perkreditan Desa				
664	.26	Pelaporan				
665	.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)				
666	.3	Koperasi Desa	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kades	informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A, Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
667	.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)				
668	.32	Koperasi Unit Desa (KUD)				
669	.4	Keuangan				
670	.41	Perkreditan Desa				
671	.42	Inventarisasi Data				
672	.43	Perkembangan/Pelaksanaan				
673	.44	Bantuan/Stimulans				
674	.45	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan				
675	.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa				
676	.51	Pusat				
677	.52	Daerah	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kades	informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A, Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
678	.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa				
679	.61	Bantuan Langsung				
680	.62	Bantuan Keserasian				
681	.63	Bantuan Juara Lomba Desa				
682	413	Sarana dan Prasarana Desa	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kades	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A, Desa
683	.1	Prasarana Desa				
684	.11	Pembinaan				
685	.12	Bimbingan Teknis				
686	.2	Pemukiman kembali penduduk				
687	.21	Lokasi				
688	.22	Diskusi				
689	.23	Pelaksanaan				
690	.3	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa				
691	.31	Rumah Sehat				
692	.32	Proyek Perintis				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
693	.33	Pelaksanaan				
694	.34	Pengembangan				
695	.35	Perbaikan Kampung				
696	.4	Perbaikan Kampung				
697	.5	Teknologi Tepat Guna (TTG)				
698	.6	Masyrakat Pradesa				
699	.61	Pembinaan				
700	.62	Penyuluhan				
701	414	Pengembangan Desa				
702	.1	Tingkat Perkembangan Desa				
703	.11	Jumlah Desa				
704	.12	Pemekaran Desa				
705	.13	Pembentukan Desa Baru				
706	.14	Evaluasi				
707	.15	Bagan				
708	.2	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)				
709	.21	Penyuluhan Program				
710	.22	Lokasi UDKP				
711	.23	Pelaksanaan				
712	.24	Bimbingan/Pembinaan				
713	.25	Evaluasi				
714	.3	Tata Desa				
715	.31	Inventarisasi	Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kades	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A, Desa
716	.32	Penyusunan Pola Tata Desa				
717	.33	Aplikasai Tata Desa				
718	.34	Pemetaan				
719	.35	Pedoman Pelaksanaan				
720	.36	Evaluasi				
721	.4	Perlombaan Desa dan Kelurahan				
722	.41	Pedoman				
723	.42	Penilaian				
724	.43	Kejuaraan				
725	.44	Piagam				
726	.5	Pemukiman Kembali Penduduk				
727	.51	Lokasi				
728	.52	Diskusi				
729	.53	Pelaksanaan				
730	.6	Masyarakat Pradesa				
731	.61	Pembinaan				
732	.62	Penyuluhan				
733	.7	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa				
734	.71	Rumah Sehat				
735	.72	Proyek Perintis				
736	.73	Pelaksanaan				
737	.74	Pengembangan				
738	.75	Perbaikan Kampung				
739	415	Koordinasi				
740	.1	Sektor Khusus				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
741	.2	Rapat Koordinasi				
742	.3	Tim Koordinasi Pusat				
743	.4	Kerjasama				
744	.41	Luar Negeri				
745	.42	Perguruan Tinggi				
746	.43	Kementrian / Lembaga Pemerintah				
747	.44	Lembaga Lainnya				
748	420	PENDIDIKAN	Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
749	.1	Pendidikan Khusus. Klasifikasi disini: Pendidikan Putra-Putri Irian Jaya				
750	.2	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan				
751	.3	Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb				
752	.4	Pendidikan Kemasyarakatan				
753	421	Sekolah (termasuk akreditasi)				
754	.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)				
755	.2	Sekolah Dasar				
756	.3	Sekolah Menengah				
757	.4	Sekolah Kejuruan				
758	.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)				
759	.6	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum	Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
760	.7	Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba-lomba				
761	.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa				
762	.9	Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf				
763	422	Administrasi Sekolah				
764	.1	Persyaratan masuk sekolah, testing ujian, OSPEK				
765	.2	Tahun Pelajaran				
766	.3	Hari Libur				
767	.4	Uang sekolah, diantaranya SPP, SPI				
768	.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi				
769	.6	Ijazah, Sertifikat				
770	.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus				
771	423	Metode Belajar				
772	.1	Kuliah				
773	.2	Ceramah, Simposium, Seminar				
774	.3	Diskusi				
775	.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang / Praktek/ PKL				
776	.5	Kurikulum				
777	.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah				
778	.7	Ujian				
779	424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru / dosen teladan, Guru/dosen berprestasi)				
780	.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri				
781	.2	Sertifikasi Guru				
782	425	Sarana Pendidikan				
783	.1	Bangunan Pendidikan				
784	.11	Gedung Sekolah				
785	.12	Kampus				
786	.13	Pusat Kegiatan				
787	.14	Perpustakaan				
788	.15	Laboratorium				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
789	.2	Buku				
790	.3	Perlengkapan Pendidikan				
791	.4	Sistem Informasi pendidikan				
792	.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan				
793	426	Keolahragaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahgraga
794	.1	Pembina Keolahragaan				
795	.11	Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)				
796	.12	Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)				
797	.13	Olah Raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional)				
798	.14	Iptek dan Industri Olah Raga				
799	.15	Sarana Prasarana Keolahragaan				
800	.2	Pesta Olahraga				
801	.3	Kemitraan Olah Raga				
802	.4	KONI	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahgraga
803	427	Kepemudaan				
804	.1	Pertukaran Pemuda				
805	.2	Paskibraka				
806	.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang				
807	.4	Kemitraan Pemuda				
808	.5	Karang Taruna				
809	428	Kepramukaan/ Kepanduan				
810	429	Pendidikan. Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri				
811	430	KEBUDAYAAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
812	.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan				
813	.2	Pembinaan bidang kebudayaan				
814	431	Kesenian				
815	.1	Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis				
816	.2	Sarana				
817	.21	Gedung Kesenian				
818	.22	Padepokan				
819	.23	Lembaga Adat				
820	.24	Kegiatan adat/ tradisi				
821	432	Kepurbakalan				
822	.1	Museum				
823	.2	Peninggalan kuno				
824	.21	Candi, termasuk pemugaran				
825	.22	Benda				
826	433	Sejarah				
827	434	Bahasa				
828	435	Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan				
829	436	Penghayat Kepercayaan				
830	440	KESEHATAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
831	.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan				
832	441	Pembinaan Kesehatan				
833	.1	Gigi				
834	.2	Mata				
835	.3	Jiwa				
836	.4	Kanker				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
837	.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)				
838	.6	Perawatan				
839	.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat				
840	.8	Kesehatan Ibu dan Anak				
841	.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)				
842	.91	JAMKESMAS				
843	.92	JAMKESDA				
844	.93	JAMPERSAL				
845	.94	Jaminan lainnya				
846	.10	Pekan Imunisasi Nasional	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
847	442	Obat-obatan				
848	.1	Pengadaan				
849	.2	Pemeriksaan Obat				
850	.3	Penyimpanan Obat				
851	.4	Distribusi Obat				
852	.5	Pengawasan Obat				
853	.51	Obat Generik				
854	.52	Obat Terlarang				
855	.53	Pemalsuan Obat				
856	443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
857	.1	Pencegahan Penyakit				
858	.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)				
859	.21	Kusta				
860	.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS				
861	.23	Frambusia				
862	.24	T.B.C				
863	.25	Kholera				
864	.26	SARS, dan Jenis penyakit lainnya				
865	.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
866	.31	Malaria				
867	.32	Dengue Haemorraghuie Fever (DHF), DBD				
868	.33	Filaria				
869	.34	Serangga				
870	.35	Rabies				
871	.36	Antrak				
872	.37	Leptosirosis				
873	.38	Chikungunya				
874	.39	Penyakit Lainnya				
875	.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular				
876	.41	A. Pektoris				
877	.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)				
878	.43	Hipertensi				
879	.44	Stroke				
880	.45	Diabetes Melitus				
881	.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Serviks				
882	.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Mammae				
883	.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Hepar				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
884		Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Paru, dan penyakit lainnya				
885	.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)				
886	.51	Imunisasi				
887	.52	Surveilanse				
888	.53	Pestisida				
889	.54	Pencemaran Udara	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
890	.55	Jamban Keluarga				
891	.56	Kesehatan Institusi				
892	.6	Higiene sanitasi				
893	.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa				
894	.62	Sarana air minum				
895	.63	Pestisida, insektisida				
896	.64	Pencemaran				
897	.65	Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga				
898	.66	Kesehatan Institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll				
899	.67	Higiene sanitasi C.A Mammae				
900	.68	Higiene sanitasi C.A Hepar				
901	.69	Higiene sanitasi C.A Paru				
902	.7	Kejadian Khusus				
903	.71	Dekopensatiokordosis (serangan jantung)				
904	.72	Asma				
905	.73	Psikosis				
906	.74	PPOM				
907	.75	Kecelakaan Lalu Lintas				
908	.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)				
909	444	Gizi dan Pengawasan Makanan				
910	.1	Kekurangan makanan				
911	.2	Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk				
912	.3	Keracunan Makanan				
913	.4	Menu Makanan Rakyat				
914	.5	Gondok endemik (GAKI)				
915	445	RSU, RSJ, RS Khusus	Terbatas	Eselon II, Eselon III	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas
916	.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien,				
917	.11	Rawat Inap				
918	.12	Rawat Jalan				
919	.13	IGD				
920	.14	IBS				
921	.5	ICU				
922	.6	MCU (Medical Check Up)				
923	.2	Penunjang Medis				
924	.21	Farmasi				
925	.22	Rekam Medik				
926	.23	Radiologi				
927	.24	Gizi				
928	.25	Laboratorium Klinik				
929	.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik				
930	.27	Bank Darah Rumah Sakit				
931	.28	Sanitasi Rumah Sakit				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
932	.29	CSSD/ Laundry				
933	3	Keperawatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas
934	.4	Komite Medik				
935	.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)				
936	.6	Mutu Rumah Sakit				
937	.61	Akreditasi				
938	.62	ISO				
939	.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)				
940	.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				
941	.67	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)				
942	.68	Promosi layanan Kesehatan				
943	.69	Kasus Hukum Rumah Sakit				
944	446	Tenaga Medis				
945	.1	Perencanaan Tenaga Medis				
946	.2	Pendayagunaan Tenaga Medis				
947	.21	Perijinan untuk Tenaga Medis				
948	.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis				
949	.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)				
950	.3	Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis				
951	.4	Diklat Tenaga Kesehatan/ Para Medis				
952	.5	Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis				
953	447	Peralatan Kesehatan				
954	.1	Standarisasi				
955	.2	Penyimpanan				
956	.3	Distribusi				
957	.4	Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan				
958	448	Pengobatan Alternatif				
959	.1	Pijat				
960	.2	Akupuntur				
961	.3	Jamu dan Herbal				
962	.4	Dukun				
963	449	Lembaga penyedia layanan kesehatan				
964	.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling				
965	.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan				
966	.3	Rumah Bersalin				
967	.4	Posyandu				
968	.5	Laboratorium Kesehatan				
969	.6	Apotik				
970	.7	Sanatorium Kesehatan				
971	450	AGAMA	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
972	.1	Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan				
973	.2	Bantuan dibidang keagamaan				
974	451	Islam				
975	.1	Peribadatan				
976	.11	Sholat	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
977	.12	Zakat, Infaq, shodaqoh				
978	.13	Puasa				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
979	.14	Umroh dan Haji			Perangkat Daerah	Daerah
980	.15	MTQ				
981	.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)				
982	.3	Tokoh Agama				
983	.4	Pendidikan Agama				
984	.41	Pendidikan Tinggi Agama				
985	.42	Menengah, MTs, MA				
986	.43	Dasar, Pra Sekolah, MI				
987	.44	Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren				
988	.45	Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll				
989	.46	Tenaga Pengajar				
990	.47	Dakwah (Pengajian, MPQ)				
991	.5	Wakaf				
992	.6	Mazhab Agama Islam				
993	.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hijab				
994	.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)				
995	.9	Peradilan				
996	452	Kristen Protestan				
997	.1	Peribadatan				
998	.2	Rumah Ibadah Gereja dll				
999	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)				
1000	.4	Mazhab Agama Kristen Protestan				
1001	.5	Organisasi Gerejani				
1002	453	Khatolik				
1003	.1	Peribadatan				
1004	.2	Rumah Ibadah Gereja dll				
1005	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
1006	.4	Mazhab Agama Khatolik				
1007	.5	Organisasi Gerejani				
1008	454	Hindu				
1009	.1	Peribadatan				
1010	.2	Rumah Ibadah Pura dll				
1011	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
1012	.4	Mazhab Agama Hindu				
1013	.5	Organisasi Agama Hindu				
1014	455	Budha				
1015	.1	Peribadatan				
1016	.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll)				
1017	3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
1018	.4	Mazhab Agama Budha				
1019	.5	Organisasi Agama Budha				
1020	456	Urusan Haji	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
1021	.1	ONH				
1022	.2	Manasik				
1023	457	Kong Hu Cu				
1024	.1	Peribadatan				
1025	.2	Rumah Ibadah Klenteng dll				
1026	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1027	.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu				
1028	.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu				
1029	460	SOSIAL	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1030	461	Rehabilitasi Penyandang Cacat				
1031	.1	Cacat Ganda				
1032	.2	Cacat Fisik				
1033	.3	Cacat Mental				
1034	.4	Cacat Mata				
1035	.5	Bisu/Tuli				
1036	462	Rehabilitasi Sosial				
1037	.1	Gelandangan/ Orang Terlantar, anak jalanan				
1038	.2	Pengemis				
1039	.3	Tuna Susila				
1040	.4	Anak Nakal				
1041	.5	Tuna Wisma				
1042	463	Kesejahteraan anak dan keluarga				
1043	.1	Kesejahteraan anak				
1044	.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)				
1045	.12	Perlindungan Anak				
1046	.13	Anak Asuh				
1047	.2	Kualitas Hidup Perempuan				
1048	.21	Perlindungan Perempuan				
1049	.22	Ibu Teladan				
1050	.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)				
1051	.3	Anak Putus Sekolah				
1052	464	Keperintisan dan Kepahlawanan				
1053	.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan				
1054	.2	Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada				
1055	.3	Cacat Veteran				
1056	465	Kesejahteraan Sosial				
1057	.1	Lanjut Usia				
1058	2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi				
1059	.3	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll				
1060	466	Sumbangan Sosial				
1061	.1	Korban Bencana				
1062	.11	Jaminan Sosial				
1063	.2	Pencarian dana untuk sumbangan : penyelanggaraan undian, ketangkasan,				
1064	.3	Panti Asuhan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1065	.4	Panti Jompo				
1066	467	Bimbingan Sosial				
1067	.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya				
1068	468	PMI	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1069	469	Makam				
1070	.1	Umum				
1071	.2	Pahlawan				
1072	.3	Khusus, Keluarga, Raja				
1073	.4	Krematorium				
1074						
1075	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Terbatas	Eselon II, Eselon III	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1076	.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan				
1077	471	Pendaftaran Penduduk				
1078	.1	Identitas Penduduk				
1079	.11	Biodata				
1080	.12	Nomor Induk Kependudukan				
1081	.13	Kartu Tanda Penduduk				
1082	.14	Kartu Keluarga				
1083	.15	Advokasi Identitas Penduduk				
1084	.2	Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1085	.21	Perpindahan penduduk WNI				
1086	.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				
1087	.23	Perpindahan penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara				
1088	.24	Daerah terbelakang				
1089	.25	Bedol Desa				
1090	.3	Perpindahan penduduk antar Negara				
1091	.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri				
1092	.32	Orang asing tinggal sementara				
1093	.33	Orang asing tinggal tetap				
1094	.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara				
1095	.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1096	.41	Akibat bencana alam				
1097	.42	Akibat kerusuhan sosial				
1098	.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang				
1099	.44	Pendaftaran penduduk rentan				
1100	472	Pencatatan Sipil	Terbatas	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1101	.1	Kelahiran kematian dan advokasi				
1102	.11	Kelahiran				
1103	.12	Kematian				
1104	.13	Advokasi				
1105	.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi				
1106	.21	Perkawinan agama Islam				
1107	.22	Perkawinan agama non Islam				
1108	.23	Perceraian agama Islam				
1109	.24	Perceraian agama non Islam				
1110	.25	Advokasi				
1111	.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan				
1112	.31	Pengangkatan anak				
1113	.32	Pengakuan anak				
1114	.33	Pengesahan anak				
1115	.34	Perubahan akta				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1116	.35	Pembatalan akta				
1117	.36	Advokasi				
1118	.4	Pencatatan Kewarganegaraan				
1119	.41	Akibat perkawinan				
1120	.42	Akibat kelahiran				
1121	.43	Non Perkawinan/ Non Kelahiran				
1122	.44	Naturalisasi				
1123	.45	Perubahan WNI ke WNA				
1124	473	Informasi Kependudukan				
1125	.1	Teknologi Informasi				
1126	.11	Perangkat Keras				
1127	.12	Perangkat Lunak				
1128	.13	Jaringan Komunikasi Data				
1129	.2	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi				
1130	.21	Daerah Maju				
1131	.22	Daerah Berkembang				
1132	.23	Daerah Terbelakang				
1133	.3	Pengolahan Data Kependudukan				
1134	.31	Pendaftaran penduduk				
1135	.32	Kejadian vital penduduk				
1136	.33	Penduduk non registrasi				
1137	.4	Pelayanan informasi kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1138	.41	Media Elektronik				
1139	.42	Media Cetak				
1140	.43	Outlet				
1141	474	Perkembangan penduduk				
1142	.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk				
1143	.11	Struktur Jumlah				
1144	.12	Komposisi				
1145	.13	Fertilitas	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1146	.14	Kesehatan Reproduksi				
1147	.15	Morbiditas Penduduk				
1148	.16	Mortalitas Penduduk				
1149	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk				
1150	.21	Anak dan Remaja				
1151	.22	Penduduk Usia Produktif				
1152	.23	Penduduk Lanjut Usia				
1153	.24	Gender				
1154	.3	Penataan Persebaran Penduduk				
1155	.31	Migrasi antar wilayah				
1156	.32	Urbanisasi				
1157	.33	Migrasi Internasional				
1158	.34	Sementara				
1159	.35	Migrasi Non Permanen				
1160	.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk				
1161	.41	Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk				
1162	.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi				
1163	.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1164	.44	Partisipasi Masyarakat				
1165	.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan				
1166	.51	Pendidikan Jalur Sekolah				
1167	.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah				
1168	.53	Pendidikan Jalur Masyarakat				
1169	.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan				
1170	475	Transmigrasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1171	.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi				
1172	.11	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi				
1173	.12	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi				
1174	.13	Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi				
1175	.14	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam				
1176	.15	Publikasi transmigrasi melalui pemeran dan kesenian				
1177	.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan				
1178	.17	Kerjasama di bidang transmigrasi				
1179	.18	Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik				
1180	.2	Pemukiman Transmigrasi				
1181	.21	Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi				
1182	.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi				
1183	.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak				
1184	.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman				
1185	.25	Standarisasi dan spesifikasi rumah transmigran, fasilitas umum / social dan				
1186	.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi,				
1187	.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi				
1188	.28	Tata ruang pemukiman transmigrasi				
1189	.281	Rancangan dan Pemanfaatan areal tanah	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1190	.282	Rancangan Kapling TSM				
1191	.283	Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas				
1192	.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa				
1193	.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah				
1194	.286	Pengukuran batas unit pemukiman				
1195	.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal				
1196	.29	Sarana Pemukiman Transmigrasi				
1197	.291	Pembinaan dan Pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan				
1198	.292	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih				
1199	.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi				
1200	.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana				
1201	.295	Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan				
1202	.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan				
1203	.31	Pengkajian dan pengembangan metode pengarahan dan penempatan				
1204	.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengarahan dan penempatan				
1205	.33	Pengerahan				
1206	.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran				
1207	.332	Berkas Persyaratan dan administrasi calon Transmigran				
1208	.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan				
1209	.34	Pemberangkatan Transmigran				
1210	.341	Pengangkutan Transmigran melalui laut, udara, dan darat				
1211	.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1212	.343	Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan				
1213	.344	Pengawalan Perjalanan Transmigran				
1214	.345	Pengaturan Rute Pemberangkatan				
1215	.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan				
1216	.35	Penempatan Transmigran				
1217	.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung				
1218	.352	Pendapatan Transmigran di lokasi yang masih dibina				
1219	.353	Data Transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT				
1220	.354	Pemantauan penempatan Transmigrasi pengganti				
1221	.4	Penampungan Transmigrasi (Transito), dan Pelatihan transmigran				
1222	.41	Pelatihan Transmigran				
1223	.411	Program Pengajaran dan metode pelatihan				
1224	.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan				
1225	.413	Penyusunan calon peserta / pelatih				
1226	.42	Penampungan Transmigran di transito				
1227	.421	Pelayanan kesehatan bagi Transmigran				
1228	.422	Pelayanan makanan bagi Transmigran				
1229	.423	Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi Transmigran				
1230	.5	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi				
1231	.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan				
1232	.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan				
1233	.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1234	.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan				
1235	.52	Pembinaan Pendidikan				
1236	.521	Penyediaan/ penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan				
1237	.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status				
1238	.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat				
1239	.54	Pembinaan Kesehatan				
1240	.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB				
1241	.542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa				
1242	.543	Pendistribusian bantuan Pangan				
1243	.55	Pembinaan rokhani				
1244	.551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama				
1245	.552	Bimbingan adaptasi masyarakat				
1246	.553	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial				
1247	.56	Pelayanan pos di daerah Transmigrasi				
1248	.57	Pennyerahan UPT yang layak untuk diserahkan				
1249	.58	Penilaian Transmigran Teladan				
1250	.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha				
1251	476	Keluarga Berencana	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1252	.1	Alat Kontrasepsi				
1253	.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri				
1254	.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)				
1255	.4	Pos KB Desa				
1256	.5	Akseptor KB				
1257	477	Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1258	.1	Indikator Kependudukan				
1259	.11	Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1260	.112	Pemanfaatan Indikator Kependudukan			Pemerintah Kabupaten Kebumen	
1261	.113	Sosialisasi Indikator Kependudukan				
1262	.12	Proyeksi Penduduk				
1263	.121	Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan				
1264	.122	Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan				
1265	.13	Analisis Dampak Kependudukan				
1266	.131	Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan				
1267	.132	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan				
1268	.14	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah				
1269	.141	Lembaga Internasional				
1270	.142	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba				
1271	.143	Lembaga Usaha Swasta				
1272	.15	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah				
1273	.151	Lembaga Pemerintah				
1274	.152	Pemerintah Provinsi dan Kota				
1275	.153	Pemerintah Kabupaten				
1276	476	Monitoring				
1277	477	Evaluasi				
1278	478	Dokumentasi				
1279	480	MEDIA MASSA	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Bagian Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika
1280	.1	Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa				
1281	481	Media Cetak meliputi perijinan hinggan pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran				
1282	.1	Surat Kabar				
1283	.2	Majalah				
1284	.3	Buletin				
1285	.4	Jurnal				
1286	.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik				
1287	.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok				
1288	.52	Perekonomian dan Perbankan				
1289	.53	Bidang Lainnya				
1290	.6	Layanan Informasi / Leaflet				
1291	.7	Masukan Analisis Gubernur				
1292	482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran				
1293	.1	Radio				
1294	.2	Televisi				
1295	.3	Film Dokumenter				
1296	.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran				
1297	.5	Kelompok pemantau Isi Siaran				
1298	.6	Pengkajian Isi Siaran				
1299	.7	SDM Penyiaran				
1300	483	Periklanan				
1301	.1	Ketentuan Pemasangan Reklame				
1302	.2	Pameran				
1303	484	Kewartawanan / Jurnalistik				
1304	.1	Pembentukan Organisasi Profesi				
1305	.2	Kasus-kasus Kewartawanan				
1306	.3	Penyalahgunaan Profesi				
1307	.4	Bantuan kepada / dari organisasi Profesi Wartawan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1308	.5	Musyawarah Wartawan Indonesia				
1309	.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan				
1310	.7	Temu Pers/Konferensi Pers				
1311	.8	Pers Tour				
1312	.9	Kunjungan Wartawan Asing				
1313	485	Penyuluhan Masyarakat				
1314	.1	Publikasi				
1315	.2	Pendirian Information Center				
1316	486	Pembinaan Bidang Infokom				
1317	.1	Training Photografi				
1318	.2	Training Berita Jurnalistik				
1319	.3	Bintek Infokom				
1320	.4	Rakorda Infokom				
1321	.5	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Bagian Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika
1322	.6	Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1323	487	Hubungan Antar Lembaga				
1324	.1	Non Pemerintah				
1325	.11	Wahana Komunikasi Masyarakat				
1326	.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat				
1327	.2	Lembaga Pemerintah				
1328	.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan				
1329	.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)				
1330	.3	Luar Negeri				
1331	.31	Promosi Luar Negeri				
1332	.32	Kunjungan Wartawan Asing				
1333	488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi				
1334	489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur				
1335	.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker,				
1336	.2	Dialog Interaktif				
1337	.3	Rubrik				
1338	.4	Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan				
1339	.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan				
1340	490	Grafika				
1341	491	Penerangan				
1342	.1	Pameran Non Komersil				
1343	492	Operation Room				
1344	493	Hubungan Masyarakat				
1345	500	PEREKONOMIAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1346	.1	Dewan Stabilisasi				
1347	501	Pengadaan Pangan				
1348	502	Pengadaan Sandang				
1349	503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada				
1350	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1351	.1	Promosi perdagangan				
1352	.11	Pekan raya				
1353	.12	Iklan				
1354	.13	Pameran				
1355	.14	Event-event				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1356	.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)				
1357	.2	Pelelangan, distribusi				
1358	.21	Pemasaran Sembako				
1359	.22	Pemasaran hasil industri				
1360	.23	Penentuan harga pokok				
1361	.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan				
1362	.31	Rencana dan Program kerja				
1363	.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi				
1364	.33	Pelaksanaan Teknis	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1365	.34	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha				
1366	.35	Evaluasi dan Pelaporan				
1367	.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)				
1368	.41	Penerbitan SIUP				
1369	.42	Perpanjangan				
1370	.43	Ijin prinsip				
1371	.44	Rekomendasi				
1372	.5	Perdagangan antar Pulau				
1373	.51	Kerjasama bahan baku				
1374	.52	Industri pemasaran				
1375	.53	Kontrak				
1376	.6	T e r a				
1377	.61	Tera dan Tera Ulang				
1378	.62	Takaran				
1379	.63	Timbangan dan anak timbangan				
1380	.64	Kalibrasi				
1381	.65	Cap tanda tera				
1382	.66	Biaya tera				
1383	.7	Bantuan peralatan				
1384	.71	Proposal				
1385	.72	Surat perjanjian/kontrak				
1386	.73	Serah terima				
1387	.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik				
1388	.9	Kemetrologian				
1389	.91	Standart Tingkat Tiga				
1390	.92	Standart Kerja Satuan Ukuran				
1391	.93	Ukuran Metrologi				
1392	.931	Peralatan				
1393	.932	Laboratorium Metrologi Legal				
1394	.933	Tanki Ukur Mobil				
1395	.934	Meter Taxi				
1396	.935	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM				
1397	.936	S P B U				
1398	511	Pemasaran				
1399	.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak				
1400	.2	P a s a r				
1401	.3	Pertokoan, kaki lima, kios				
1402	.4	Pusat perbelanjaan				
1403	512	Ekspor				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1404	.1	Ekspor Hasil Industri				
1405	.2	Ijin Ekspor				
1406	.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri				
1407	.4	Managemen Perdagangan Internasional				
1408	.5	Eksport Hasil Industri	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1409	.51	Kebijakan				
1410	.52	Pemasaran				
1411	.6	Pemberitahuan Eksport Barang				
1412	.7	Pengawasan Mutu Barang				
1413	.8	Eksportir Terdaftar				
1414	.9	Evaluasi dan pelaporan				
1415	513	Impor				
1416	.1	Ijin Impor				
1417	.11	Pemberian Ijin				
1418	.12	Pengendalian Ijin				
1419	.2	Standart Mata Dagang Import				
1420	.3	Management Perdagangan Internasional				
1421	.4	Kegiatan Import				
1422	.41	Pembinaan Import				
1423	.42	Pengendalian Import				
1424	.43	Pemantauan Import				
1425	.5	Faktor-faktor Pendukung				
1426	.6	Pengawasan Mutu Barang Import				
1427	.7	Penyaluran Kegiatan Import				
1428	.71	Bahan Konsumsi				
1429	.72	Bahan Baku				
1430	.73	Bahan Penolong				
1431	.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import				
1432	514	Perdagangan antar Pulau				
1433	.1	Kerjasama Bahan Baku				
1434	.2	Industri Pemasaran				
1435	.3	Kontrak				
1436	515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri				
1437	.1	Promosi dan Informasi				
1438	.2	Pameran				
1439	.3	Kerjasama				
1440	516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng				
1441	.1	Peti Kemas				
1442	.2	Tangki Penyimpanan				
1443	517	Aneka Usaha Perdagangan				
1444	518	Koperasi (Untuk BUUD, KUD)	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1445	.1	Bina Usaha Koperasi				
1446	.11	.1 Koperasi Pertanian				
1447	.12	.2 Koperasi Non Pertanian				
1448	.13	.3 Permodalan Koperasi				
1449	.131	Penumpukan Modal				
1450	.132	Pemanfaatan Modal				
1451	.133	Perbankan dan Asuransi				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1452	.134	Permodalan Luar Koperasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1453	.135	Kredit Program Umum				
1454	.1	Kredit Program Khusus				
1455	.14	Distribusi dan Jasa Koperasi				
1456	.141	Distribusi Bahan Pokok				
1457	.142	Distribusi Aneka Bahan				
1458	.143	Distribusi Kerjasama Niaga				
1459	.144	Jasa Angkutan				
1460	.145	Jasa Perumahan				
1461	.146	Aneka Jasa				
1462	.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi				
1463	.2	Bina Lembaga Koperasi				
1464	.21	Organisasi Koperasi				
1465	.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi				
1466	.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi				
1467	.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi				
1468	.214	Keragaan Koperasi				
1469	.215	Pengakuan Koperasi Sekolah				
1470	.216	Amalgamasi				
1471	.217	Tertib Organisasi Koperasi				
1472	.218	Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan				
1473	.219	Bimbingan Kesadaran Hukum				
1474	.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi				
1475	.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi				
1476	.222	Pengurus dan Bahan Pemeriksa				
1477	.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)				
1478	.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)				
1479	.23	Bina Tata Laksana Koperasi				
1480	.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan				
1481	.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan				
1482	.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder				
1483	.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi				
1484	.241	Administrasi Koperasi Pedesaan				
1485	.242	Administrasi Koperasi Perkotaan				
1486	.243	Karyawan/Manager Koperasi				
1487	.244	Sumber Daya Manusia				
1488	.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)				
1489	.246	Penyaluran Alat Sekolah				
1490	.247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi/KUD				
1491	.25	Akuntansi				
1492	.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan				
1493	.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan				
1494	.253	Akuntansi Koperasi Sekunder				
1495	.26	Pengawasan Koperasi				
1496	.261	Pengawasan Koperasi Primer	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1497	.262	Pengawasan Koperasi Sekunder				
1498	.263	Koperasi Jasa Audit				
1499	.264	Kerjasama Kantor Akuntan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1500	.27	Penyuluhan Koperasi			Kabupaten Kebumen	
1501	.271	Pembinaan Kader Koperasi				
1502	.272	Masyarakat Umum				
1503	.273	Forum Komunikasi				
1504	.274	Kelompok Tani				
1505	.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)				
1506	.276	Penilaian Tingkat Nasional				
1507	.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
1508	.31	Pembinaan Usaha				
1509	.311	Pembinaan Usaha Mikro				
1510	.312	Pembinaan Usaha Kecil				
1511	.313	Pembinaan Usaha Menengah				
1512	.32	Pengawasan Usaha				
1513	.321	Pengawasan Usaha Mikro				
1514	.322	Pengawasan Usaha Kecil				
1515	.323	Pengawasan Usaha Menengah				
1516	520	PERTANIAN	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1517	521	Tanaman Pangan				
1518	.1	Rencana dan Program				
1519	.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit				
1520	.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian				
1521	.13	Penyuluhan				
1522	.2	Produksi				
1523	.21	Padi				
1524	.22	Palawija				
1525	.23	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)				
1526	.24	Panen Gagal (Puso)				
1527	.25	Jagung				
1528	.26	Ketela Pohon/Ubi-ubian				
1529	.27	Pembudidayaan Rumput Laut				
1530	.3	Sarana Usaha Pertanian				
1531	.31	Peralatan				
1532	.32	Meliputi Traktor dan sebagainya				
1533	.33	Pembenihan dan pembibitan				
1534	.34	Pupuk				
1535	.35	Irigasi Pertanian				
1536	.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian				
1537	.4	Perlindungan Tanaman				
1538	.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan				
1539	.411	Penyakit Tanaman Pangan	Biasa/Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1540	.412	Hama tanaman pangan				
1541	.42	Pemberantas				
1542	.421	Pestisida				
1543	.422	Agensia Pengendalian Hayati				
1544	.43	Tanah Pertanian Pangan				
1545	.431	Persawahan				
1546	.432	Perladangan				
1547	.433	Kebun				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1548	.434	Rumpon Ikan Laut				
1549	.5	Pengusaha, Petani				
1550	.6	Lahan Kritis				
1551	.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian				
1552	.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian				
1553	.9	Bina Usaha				
1554	.91	Pasca Panen				
1555	.92	Pemasaran Hasil				
1556	523	Perikanan dan Kelautan	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1557	.1	Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan				
1558	.11	Penyuluhan				
1559	.12	Teknologi				
1560	.2	Produksi Perikanan				
1561	.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan				
1562	.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC				
1563	.23	Sertifikasi Kesehatan Ikan				
1564	.3	Usaha Perikanan				
1565	.31	Pelatihan Nelayan				
1566	.32	Pembinaan wanita nelayan				
1567	.33	Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP				
1568	.34	Perbenihan				
1569	.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan				
1570	.41	Ekspor Hasil Perikanan				
1571	.42	Impor Hasil Perikanan				
1572	.43	Pemasaran Dalam Negeri				
1573	.44	Pengusaha perikanan				
1574	.5	Sarana Perikanan				
1575	.51	Pelabuhan Perikanan Pantai				
1576	.52	TPI/PPI				
1577	.53	Kesyahbadaran				
1578	.54	Peralatan penangkapan : Kapal, perahu, jaring, pump dsb				
1579	.6	Pengendalian hama dan penyakit				
1580	.61	Penyakit Ikan				
1581	.62	Hama Ikan				
1582	.63	Obat-obatan termasuk sertifikasinya				
1583	.7	Konservasi dan Suaka Laut	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1584	.71	Transplatasi bibit Karang				
1585	.72	Terumbu Karang				
1586	.73	Mangrove				
1587	.74	Garam				
1588	.75	Harta Karun di dalam laut				
1589	.76	Pembinaan / Pendidikan masyarakat pesisir				
1590	524	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1591	.1	Produksi				
1592	.11	Perbibitan				
1593	.12	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan				
1594	.13	Budidaya				
1595	.14	Susu Ternak Rakyat				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1596	.15	Telur				
1597	.16	Daging				
1598	.17	Kulit				
1599	.2	Usaha Peternakan				
1600	.21	Pelayanan Usaha				
1601	.22	Pengolahan Hasil dan Pemasaran				
1602	.23	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan				
1603	.3	Kesehatan Hewan				
1604	.31	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan				
1605	.32	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan				
1606	.33	Obat-obat Hewan				
1607	34	Pelayanan Kesehatan Hewan				
1608	.4	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan				
1609	.41	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan				
1610	.42	Hygieni dan Sanitasi				
1611	.43	Produk Hewani				
1612	.5	Laboratorium Kesehatan Hewan				
1613	.51	Pengujian Mutu Asal Hewan				
1614	.52	Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan				
1615	.6	Inseminasi Buatan				
1616	.61	Produksi Distribusi dan Pemasaran				
1617	.62	Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi				
1618	.7	Pembibitan dan Budi Daya Ternak				
1619	.71	Ternak Non Ruminansia				
1620	.72	Ternak Ruminansia				
1621	.8	Sarana Usaha Ternak				
1622	.81	Pembibitan				
1623	.82	Kandang Ternak				
1624	.9	Kesehatan Hewan				
1625	.91	Penyakit Hewan				
1626	.92	Pos Kesehatan Hewan				
1627	.93	Test Pulorum	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1628	.94	Karantina				
1629	.95	Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk upaya pencegahannya				
1630	.10	Makanan Ternak				
1631	.11	Tempat Pemotongan Hewan				
1632	.12	Data Peternakan				
1633	525	Perkebunan	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1634	.1	Program dan Pelaporan				
1635	.11	Pelaporan				
1636	.12	Monitoring				
1637	.13	Statistik Perkebunan				
1638	.2	Produksi				
1639	.21	Karet				
1640	.22	T e h				
1641	.23	Tembakau				
1642	.24	T e b u				
1643	.25	Cengkeh				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1644	.26	Kelapa/ Kopra / Kelapa Sawit				
1645	.27	Kopi				
1646	.28	Kakao				
1647	.29	Jenis Tanaman yang Lain				
1648	.3	Usaha Perkebunan				
1649	.31	Benih				
1650	.32	Pembibitan				
1651	.33	Kelompok Tani				
1652	.34	Kemitraan				
1653	.35	Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan				
1654	.36	Pemasaran Hasil Perkebunan				
1655	.4	Perlindungan Tanaman				
1656	.41	H a m a				
1657	.42	Pestisida				
1658	.43	Agensia Pengendalian Hayati				
1659	.5	Alat dan Mesin Perkebunan				
1660	.51	Power Sprayer				
1661	.52	Hand Sprayer				
1662	.53	Polibag				
1663	.54	Alat Laboratorium Perkebunan				
1664	.55	Reagen				
1665	.56	Sarana / Alat Produksi Perkebunan				
1666	.6	Pengolahan lahan				
1667	.61	Terasering				
1668	.7	Pemasyarakatan				
1669	.71	Penyuluhan				
1670	.72	Sosialisasi	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1671	.73	Informasi				
1672	526	Ketahanan Pangan				
1673	.1	Program Bimbingan Massal				
1674	.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya				
1675	.21	Pembinaan Teknologi				
1676	.22	Sarana Produksi dan Permodalan				
1677	.23	Kelembagaan				
1678	.3	Agribisnis				
1679	.31	Mutu Hasil				
1680	.32	Pengelola Hasil Pangan				
1681	.33	Pemasaran Hasil				
1682	.34	Kementrian				
1683	.4	Distribusi Pangan				
1684	.41	Sistem dan Pola Distribusi				
1685	.42	Sarana dan Prasarana Distribusi				
1686	.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan				
1687	.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan				
1688	.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan				
1689	.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat				
1690	.53	Sistem Informasi Pangan				
1691	527	Penyuluhan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1692	.1	Sumber Daya Manusia				
1693	.11	Penyuluh				
1694	.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha				
1695	.13	Stake holder				
1696	.2	Kelembagaan				
1697	.21	Struktual				
1698	.22	Non Struktual				
1699	.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha				
1700	.24	Lembaga Profesi				
1701	.3	Penyelenggaraan Penyuluhan				
1702	.31	Program / Metode				
1703	.32	Promosi / pameran / kampanye				
1704	.33	Penghargaan / Lomba				
1705	.34	Materi				
1706	530	PERINDUSTRIAN	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1707	.1	Undang-undang Gangguan				
1708	531	Industri Logam				
1709	532	Industri Mesin / Elektronik				
1710	533	Industri Kimia / Farmasi				
1711	534	Industri Tekstil				
1712	535	Industri makanan / Minuman				
1713	536	Aneka Industri / Perusahaan				
1714	.1	Home Industri				
1715	537	Aneka Kerajinan				
1716	.1	Kerajinan Rakyat				
1717	538	Usaha Negara	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1718	.1	Perjan				
1719	.2	Perum				
1720	.3	Persero				
1721	539	Perusahaan Daerah				
1722	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPTMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1723	541	Minyak dan Gas Bumi				
1724	.1	Pengusahaan				
1725	.11	Perijinan				
1726	.12	Rekomendasi				
1727	.13	Kontrak Karya				
1728	.14	Pengolahan				
1729	.2	Penyaluran				
1730	.3	Tangki, Pompa, Tanker				
1731	542	Energi				
1732	1	Energi Alternatif				
1733	.11	Gas Rawa				
1734	.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)				
1735	.13	Biogas				
1736	.14	Energi baru terbarukan				
1737	.15	Perijinan				
1738	.16	Rekomendasi				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1739	.17	Pembinaan dan Pengawasan				
1740	.2	Konservasi Energi				
1741	.3	Pemetaan Energi				
1742	.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				
1743	543	Pertambangan, mineral dan batubara				
1744	.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)				
1745	.11	WIUP Batuan				
1746	.12	WIUP Bukan Logam				
1747	.13	WIUP Logam				
1748	.14	WIUP Batubara				
1749	.2	Rekomendasi Teknis				
1750	.3	Perijinan				
1751	.31	IUP Eksplorasi				
1752	.32	IUP Operasi Produksi				
1753	.33	IUP Operasi Produksi Khusus				
1754	.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan				
1755	.35	Pencabutan Ijin				
1756	.4	Pembinaan	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPTMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1757	.5	Pengawasan				
1758	.51	Pengawasan Usaha Pertambangan				
1759	.52	Penerbitan Kegiatan Pertambangan				
1760	.6	Pasca Tambang				
1761	.61	Reklamasi				
1762	.62	Penutupan				
1763	544	Air Tanah				
1764	.1	Cekungan Air Tanah (CAT)				
1765	.11	Pemetaan CAT				
1766	.12	Imbuhan CAT				
1767	.13	Lepasan CAT				
1768	.14	Konservasi				
1769	.15	Pengendalian Daya Rusak				
1770	.2	Rekomendasi Teknis				
1771	.3	Sumur Artesis				
1772	.4	Sumur Bor				
1773	.5	Sumur Gali (Pasak)				
1774	.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)				
1775	.7	Sumur Pantau				
1776	.8	Harga Dasar Air / Nilai Perolehan Air				
1777	.9	Hidrologi				
1778	545	Geologi	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1779	.1	Pemetaan				
1780	.2	Mitigasi Bencana Geologi	Terbuka	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1781	.3	Vulkanologi				
1782	.31	Pengawasan Vulkanologi				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1783	.32	Panas Bumi			mengganggu kinerja	
1784	.4	Hidrogeologi			Perangkat Daerah	
1785	.5	Gerakan Tanah (longsoran, amblesan)				
1786	.6	Pengawasan, pengendalian				
1787	546	Hidrologi				
1788	547	Kesamudraan				
1789	548	Penghematan Energi				
1790	550	PERHUBUNGAN	Terbatas	Eselon II,	Informasinya memiliki	Dinas Perhubungan
1791	551	Perhubungan Darat		Eselon III dan	dampak yang dapat	
1792	.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau		Eselon IV	mengganggu kinerja	
1793	.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu			Perangkat Daerah	
1794	.12	Uji Kelayakan kendaraan Bermotor (Keur)				
1795	.13	Kecelakaan Lalu Lintas				
1796	.2	Angkutan Jalan Raya	Terbatas	Eselon II,	Informasinya memiliki	Dinas Perhubungan
1797	.21	Perizinan		Eselon III dan	dampak yang dapat	
1798	.22	Terminal		Eselon IV	mengganggu kinerja	
1799	.23	Alat Angkutan			Perangkat Daerah	
1800	.24	Jembatan Timbang / Lebih Muatan				
1801	.25	Uji Mutu				
1802	.3	Angkutan Sungai				
1803	.31	Keselamatan, Rambu-rambu				
1804	.32	Lalu Lintas				
1805	.33	Alur dan Kolam Pelabuhan				
1806	.34	Trayek				
1807	.35	Sarana / Kapal				
1808	.36	Pelabuhan				
1809	.37	Terminal				
1810	.38	Kecelakaan				
1811	.39	Perizinan				
1812	.4	Angkutan Danau				
1813	.41	Keselamatan, Rambu-rambu				
1814	.42	Lalu Lintas				
1815	.43	Alur dan Kolam Pelabuhan				
1816	.44	Trayek				
1817	.45	Sarana / Kapal				
1818	.46	Pelabuhan				
1819	.47	Terminal				
1820	.48	Kecelakaan				
1821	.49	Perizinan				
1822	.5	Perkereta-Apian				
1823	.51	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie				
1824	.52	Prasarana (Jalan/Jembatan)				
1825	.53	Trayek				
1826	.54	Angkutan Penumpang				
1827	.55	Angkutan Barang				
1828	.56	Keselamatan				
1829	.57	Kecelakaan				
1830	.58	Perawatan / Perbaikan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1831	.59	Perizinan				
1832	552	Perhubungan Laut				
1833	.1	Lalu Lintas Angkatan Laut				
1834	.11	Pelayaran Dalam Negeri				
1835	.12	Pelayanan Luar Negeri				
1836	.13	Pelayaran Haji				
1837	.14	Pelayanan Charter / Wisata Turis				
1838	.15	Pelayaran Khusus				
1839	.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu				
1840	.2	Perkapalan - Alat Angkutan	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
1841	.21	Kapal Penumpang				
1842	.22	Kapal Barang				
1843	.23	Kapal Perang / Patroli / Negara				
1844	.24	Kapal Tanker				
1845	.25	Ponton, Tongkong				
1846	.26	Kapal Layar				
1847	.27	Kapal Layar Motor				
1848	.28	Kapal Kontainer				
1849	.3	Pelabuhan				
1850	.31	Tanah / Lokasi				
1851	.32	Alur Layar				
1852	.33	Dermaga				
1853	.34	Terminal Penumpang				
1854	.35	Terminal Kontainer				
1855	.36	Bantuan / Gedung / Gudang				
1856	.37	Perlengkapan Tambat Labuh				
1857	.38	Lapangan Penumpukan				
1858	.39	Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus				
1859	.4	Pengerukan / Perawatan				
1860	.41	Alur Pelayaran				
1861	.42	Kolam Pelabuhan				
1862	.43	Reklamasi Pantai				
1863	.44	Dumping Area				
1864	.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)				
1865	.5	Penjagaan Pantai				
1866	.51	Patroli Bandar				
1867	.52	Patroli Perairan				
1868	.53	Penjagaan pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)				
1869	.6	Angkutan Barang				
1870	.61	P o s				
1871	.62	Minyak				
1872	.63	L o g				
1873	.64	Ternak				
1874	.65	Sembilan Bahan Pokok				
1875	.66	Peti Kemas / EMKL				
1876	.67	Muatan Umum				
1877	.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri				
1878	.69	Bongkar Muatan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1879	.7	Keselamatan				
1880	.71	Rambu-rambu / Mercu suar				
1881	.72	Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal				
1882	.73	Fasilitas Keselamatan				
1883	.74	Telekomunikasi Pelayaran				
1884	.75	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
1885	.76	Sertifikasi Awak Kapal				
1886	.8	Kecelakaan, Gangguan				
1887	.81	Kecelakaan Penumpang / Kapal				
1888	.82	Kecelakaan Barang				
1889	.83	Gangguan sarana / prasarana				
1890	.84	Pembajakan/ penyelundupan				
1891	.85	Pencemaran				
1892	.9	Perijinan				
1893	.91	Ijin Berlayar				
1894	.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air				
1895	.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal				
1896	.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang				
1897	.95	Ijin Usaha Angkutan Laut				
1898	.96	Ijin Usaha Penunjang Angkatan Laut				
1899	.97	Ijin Pelayaran Jasa Kepelabuhan				
1900	.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus				
1901	.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus				
1902	553	Perhubungan Udara				
1903	.1	Lalu Lintas Angkatan Udara				
1904	.11	Penerbangan Domestik				
1905	.12	Penerbangan Luar Negeri				
1906	.13	Penerbangan Haju				
1907	.14	Penerbangan Charter / Non Reguler				
1908	.15	Penerbangan Khusus / Jembatan Udara				
1909	.2	Pelabuhan Udara				
1910	.21	Tanah / Lokasi				
1911	.22	Landasan				
1912	.23	Appron				
1913	.24	Terminal Penumpang				
1914	.25	Terminal Cargo				
1915	.26	Bangunan / Gedung				
1916	.27	Perlengkapan				
1917	.28	Parkir Kendaraan				
1918	.3	Alat Angkutan				
1919	.31	Pesawat Udara				
1920	.32	Helikopter				
1921	.4	Angkutan Barang				
1922	.41	Pos				
1923	.42	Muatan Dalam Negeri				
1924	.43	Muatan Luar Negeri				
1925	.44	EMPU				
1926	.5	Sertifikasi Kelaikan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1927	.51	Kelaikan Pesawat Udara				
1928	.52	Kelaikan Peralatan Penunjang	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
1929	.53	Kelaikan Personil / Awak Kapal				
1930	.6	Keselamatan				
1931	.61	Rambu-rambu				
1932	.62	Perakitan / Kalibrasi				
1933	.63	Fasilitas keselamatan				
1934	.64	Telekomunikasi Penerbangan				
1935	.7	Kecelakaan / Gangguan				
1936	.71	Kecelakaan Penumpang				
1937	.72	Kecelakaan Barang				
1938	.73	Gangguan sarana / prasarana				
1939	.74	Pembajakan				
1940	.75	Pencemaran				
1941	.8	Umum				
1942	.81	Asuransi				
1943	.82	Asosiasi				
1944	.83	SATPAM				
1945	.84	Rally Udara / Lomba				
1946	.9	Perizinan				
1947	.91	Izin Terbang / Flight Approval				
1948	.92	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU				
1949	.93	Pembukaan Kantor Cabang				
1950	.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan				
1951	.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus				
1952	555	Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1953	.1	Kebijakan				
1954	.2	Peralatan				
1955	.21	Telepon				
1956	.22	Internet / USO				
1957	.23	Telegram, Telex / SBB, Faximile				
1958	.24	Satelit, Stasiun Bumi				
1959	.25	Radio Komunikasi				
1960	.3	Sistem				
1961	.4	Pembinaan / Penerbitan				
1962	.5	Perijinan				
1963	556	Pariwisata dan Rekreasi	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1964	.1	Usaha Pariwisata				
1965	.11	Usaha Jasa Pariwisata				
1966	.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata				
1967	.112	Restoran dan Rumah Makan				
1968	.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata				
1969	.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata				
1970	.14	Ijin Usaha Sarana				
1971	.141	Ijin Pariwisata				
1972	.142	Ijin Usaha Pariwisata	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1973	.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata				
1974	.144	Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1975	.145	Ijin Usaha Sarana			mengganggu kinerja	
1976	.15	Wisatawan			Perangkat Daerah	
1977	.151	Wisatawan Nusantara				
1978	.152	Wisatawan Mancanegara				
1979	.16	Promosi dan Informasi Pariwisata				
1980	.161	Dalam Negeri				
1981	.162	Luar Negeri				
1982	.2	Perhotelan				
1983	.21	Status Hotel				
1984	.22	Kelas Hotel				
1985	.23	T a r I f				
1986	.3	Travel Service				
1987	.31	Pramu Wisata				
1988	.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata				
1989	.33	Souvenir				
1990	.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)				
1991	.4	Tempat Rekreasi				
1992	.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata				
1993	.411	Ciptaan Tuhan				
1994	.412	Hasil Karya Manusia				
1995	.42	Rehabilitasi / Perawatan				
1996	.43	Pengembangan Fasilitas				
1997	.44	Tanah / Bangunan				
1998	.45	Bina Usaha				
1999	.46	Institusi				
2000	.461	Asosiasi				
2001	.462	Lembaga Kepariwisataan				
2008	560	TENAGA KERJA	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2009	.1	Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri				
2010	.11	Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah				
2011	.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI				
2012	.3	Rekruitmen Calon TKI / TKW				
2013	.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri				
2014	.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW				
2015	.42	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW				
2016	.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW				
2017	.5	Persyaratan Naker TKI / TKW				
2018	.51	Permohonan Rekomendasi Passport				
2019	.52	Perjanjian Kerja TKI / TKW				
2020	.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)				
2021	.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri				
2022	.55	Pelatihan TKI / TKW	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2023	.6	Pemberangkatan Naker				
2024	.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri				
2025	.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke Luar Negeri				
2026	.63	Berita Acara Serah Terima TKI / TKW				
2027	.7	Pemulangan Naker				
2028	.71	Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2029	.72	Pemulangan TKI / TKW Ilegal				
2030	.73	TKI / TKW Terkena Kasus Pidana				
2031	.8	Pengangguran				
2032	561	Upah				
2033	.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional				
2034	.2	Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum				
2035	.3	Kebutuhan Fisik Minuman				
2036	.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)				
2037	.5	Laporan Data Remintance				
2038	.6	Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW				
2039	562	Penempatan				
2040	.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)				
2041	.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)				
2042	.12	Penempatan Naker Non Terdidik Non Profesional				
2043	.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha / Peluasan Kerja				
2044	.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KLB)				
2045	.3	Lembaga Penyalur Naker				
2046	.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan				
2047	.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)				
2048	.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)				
2049	563	Latihan Kerja				
2050	.1	Pendidikan Kerja				
2051	.11	Pendidikan dan Latihan Kerja				
2052	.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)				
2053	.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)				
2054	.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja				
2055	.21	Tempat Pelatihan (BLK)				
2056	.22	Instruktur / Pelatihan				
2057	.23	Modul / Silabus dan Bahan Praktek				
2058	.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran				
2059	.25	Sertifikat				
2060	.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja				
2061	564	Tenaga Sukarela				
2062	.1	Butsi				
2063	.2	Padat Karya				
2064	565	Perselisihan Kerja				
2065	.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker				
2066	.11	Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2067	.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER				
2068	.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER				
2069	.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER				
2070	.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)				
2071	.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)				
2072	.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)				
2073	.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)				
2074	.2	Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja				
2075	566	Keselamatan Kerja				
2076	.1	Instalasi Proteksi Kebakaran				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2077	.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja				
2078	.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja				
2079	4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
2080	.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja				
2081	.6	Pengujian dan hasil Pemeriksaan Hyperkes				
2082	.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha				
2083	.8	Perlengkapan Sarana Kerja				
2084	.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)				
2085	.82	Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)				
2086	.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel				
2087	.84	Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan				
2088	.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran				
2089	.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (Shift Malam)				
2090	567	Pemutusan Hubungan Kerja				
2091	.1	Pengaduan PHK Sepihak				
2092	.2	PHK Massal				
2093	.3	Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK				
2094	.4	Ijin Melakukan PHK				
2095	.5	Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK				
2096	.6	Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang Di PHK				
2097	.7	Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK				
2098	568	Kesejahteraan Pekerja				
2099	.1	Bantuan Kredit / bantuan Modal Kerja bagi Naker				
2100	.11	Pemilihan Pekerja Teladan				
2101	.2	Perumahan Pekerja				
2102	.3	Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek				
2103	.4	Koperasi Pekerja				
2104	.5	Sarana Transportasi Pekerja				
2105	.6	Perpustakaan Pekerja				
2106	.7	Tempat Ibadah Pekerja				
2107	.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja				
2108	.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan				
2109	.91	Lembaga Kerjasama Bipartid				
2110	569	Tenaga Kerja Orang Asing	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2111	.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)				
2112	.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)				
2113	.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing				
2114	.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing				
2115	.5	Data Tenaga Kerja Asing				
2116	.6	Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing				
2117	.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing				
2118	.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing				
2119	.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal				
2120	570	PENANAMAN MODAL	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPTMPTSP
2121	.1	Penanaman Modal Dalam Negeri				
2122	.2	Penanaman Modal Luar Negeri				
2123	571	Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)				
2124	572	Pasar Uang dan Modal				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2125	573	Saham				
2126	574	Modal Domestik				
2127	580	PERBANKAN MONETER	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
2128	581	Kredit				
2129	582	Inventasi				
2130	583	Tabungan				
2131	.1	Deposito				
2132	.2	Tabanas				
2133	.3	Taska				
2134	.4	Tapelpram				
2135	584	Bank Pembangunan Daerah				
2136	.1	Bank Jateng				
2137	.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar				
2138	585	Asuransi				
2139	.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas				
2140	.2	Polis				
2141	.3	Premi				
2142	.4	Tertanggung / Pemegang Polis				
2143	.5	Uang Pertanggungan				
2144	586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer				
2145	587	Fiscal				
2146	588	Hutang Negara Obligasi				
2147	589	Moneter				
2229	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2230	601	Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi				
2231	602	Kontraktor Pemborong				
2232	.1	Tender				
2233	.2	Penunjukan				
2234	.3	Prakualifikasi			Perangkat Daerah	
2235	.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)				
2236	.32	Tanda Daftar Rekanan (TDR)				
2237	603	Arsitektur				
2238	604	Bahan Bangunan				
2239	.1	Tanah dan Batu				
2240	.2	Aspal				
2241	.3	Besi dan logam lainnya				
2242	.31	Besi beton				
2243	.32	Besi Profil (konstruksi)				
2244	.33	Paku				
2245	.34	Alumunium profil				
2246	.4	Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)				
2247	.5	S e m e n				
2248	.6	K a y u				
2249	.7	Bahan penutup Atap				
2250	.8	Alat-alat penggantung dan pengunci				
2251	.9	Bahan -bahan bangunan lainnya				
2252	605	I n s t a l a n s i				
2253	.1	Instalansi bangunan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2254	.2	Instalansi listrik				
2255	.3	Instalansi air/sanitasi				
2256	.4	Instalansi pengatur udara				
2257	.5	Instalansi akustik				
2258	.6	Instalansi cahaya/penerangan				
2259	606	Konstruksi pencegahan				
2260	.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran				
2261	.2	Terhadap gempa				
2262	.3	Terhadap angin/udara/panas				
2263	.4	Terhadap Kegaduhan				
2264	.5	Terhadap gas/explosive				
2265	.6	Terhadap serangga				
2266	.7	Terhadap radiasi atom				
2267	610	P E N G A I R A N	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2268	611	Irigasi				
2269	.1	Bangunan Waduk				
2270	.11	Bendungan				
2271	.12	Tanggul				
2272	.13	Pelimpahan banjir				
2273	.14	Menara pengambilan				
2274	.15	Pembangunan dermaga				
2275	.2	Bangunan pengambilan				
2276	.21	Bendungan				
2277	.22	Bendungan dengan pintu bilas				
2278	.23	Bendungan dengan pompa	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2279	.24	Pengambilan bebas				
2280	.25	Pengambilan bebas dengan pompa				
2281	.26	Sumur dengan pompa				
2282	.27	Kantung lumpur				
2283	.28	Silt ekstretor				
2284	.29	Escope channel				
2285	.3	Bangunan pembawa				
2286	.31	Saluran				
2287	.311	Saluran Induk				
2288	.312	Saluran Sekunder				
2289	.313	Suplesi				
2290	.314	Tersier				
2291	.315	Saluran kwarter				
2292	.316	Saluran pasangan				
2293	.317	Saluran tertutup / terowongan				
2294	.32	Bangunan				
2295	.321	Bangunan pagi				
2296	.322	Bangunan dan sadap				
2297	.323	Bangunan sadap				
2298	.324	Bangunan check				
2299	.325	Bangunan Terjun				
2300	.3	Bax Tersier				
2301	.34	Got miring				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2302	.35	Talang				
2303	.36	Syphon				
2304	.37	Gorong-gorong				
2305	.38	Pelimpahan samping				
2306	.4	Bangunan Pembangunan				
2307	.41	Saluran				
2308	.411	Saluran Pembuangan Induk				
2309	.412	Saluran Pembuangan Sekunder				
2310	.413	Saluran Pembangunan Tersier				
2311	.42	Bangunan				
2312	.421	Bangunan Out let				
2313	.422	Bangunan terjun				
2314	.423	Bangunan penahan banjir				
2315	.43	Gorong-gorong pembuangan				
2316	.44	Talang Pembuangan				
2317	.45	Syphon pembuangan				
2318	.5	Bangunan Lainnya				
2319	.51	Jalan				
2320	.511	Jalan Inspeksi				
2321	.512	Jalan Logistik				
2322	.52	Jembatan	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2323	.521	Jembatan inspeksi				
2324	.522	Jembatan hewan				
2325	.53	Tangga cuci				
2326	.54	Kubangan kerbau				
2327	.55	Waduk lapangan				
2328	.56	Bangunan penunjang				
2329	.57	Jaringan telepon				
2330	.58	Stasiun Argo				
2331	.59	Bangunan TPI dan pasar iklan				
2332	612	P o l d e r				
2333	.1	Tanggul keliling				
2334	.11	Tanggul				
2335	.12	Bangunan penutup sungai				
2336	.13	Jembatan				
2337	.2	Bangunan pembawa				
2338	.21	Saluran				
2339	.211	Saluran muka				
2340	.212	Saluran pembawa induk				
2341	.213	Saluran pembawa sekunder				
2342	.214	Saluran stasium pompa pemasukan				
2343	.2	Bangunan bagi :				
2344	.221	Gorong-gorong				
2345	.222	Syphon				
2346	.3	Bangunan pembuangan				
2347	.31	Stasiun pompa pembangunan				
2348	.32	Saluran				
2349	.321	Saluran pembawa induk				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2350	.322	Saluran pembawa sekunder				
2351	.323	Saluran Pembuangan Induk				
2352	.324	Saluran Pembuangan Sekunder				
2353	.33	Pintu air pembuangan				
2354	.34	Gorong-gorong pembuangan				
2355	.3	Syphon pembuangan				
2356	.4	Bangunan lainnya				
2357	.41	Bangunan				
2358	.411	Bangunan pengukur air				
2359	.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan				
2360	.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa				
2361	.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa				
2362	.42	Rumah Petugas Eksploitasi				
2363	613	Pasang surut				
2364	.1	Bangunan pembawa				
2365	.11	Saluran				
2366	.111	Saluran Pembawa Induk	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2367	.112	Saluran Pembawa Sekunder				
2368	.113	Saluran Pembawa Tersier				
2369	.14	Saluran Penyimpanan Air				
2370	.15	Saluran Pintu Pembuangan				
2371	.2	Bangunan pembuangan				
2372	.21	Saluran				
2373	.211	Saluran Pembawa Induk				
2374	.212	Saluran Pembawa Sekunder				
2375	.213	Saluran Pembawa Tersier				
2376	.214	Saluran Penyimpanan Air				
2377	.215	Saluran Pintu Pembuangan				
2378	.216	Saluran Pembuang Induk				
2379	.217	Saluran Pembuang Sekunder				
2380	.218	Saluran Pembuang Tersier				
2381	.219	Saluran Pengumpul Air				
2382	.22	Bangunan Pintu Pembuang				
2383	.3	Bangunan lainnya				
2384	.31	Kolom pasang				
2385	.32	Saluran				
2386	.321	Saluran Lalu Lintas				
2387	.322	Saluran Muka				
2388	.33	Bangunan				
2389	.331	Bangunan Penangkis Kotoran				
2390	.332	Bangunan Pengukur Muka air				
2391	.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan				
2392	.34	Jalan				
2393	.35	Jembatan				
2394	614	Pengendalian Sungai				
2395	.1	Bangunan pengaman				
2396	.11	Tanggul banjir				
2397	.12	Pintu Pengatur Banjir				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2398	.13	Klep Pengatur Banjir				
2399	.14	Tembok pengaman talut				
2400	.15	K r i b				
2401	.16	Kantung lumpur				
2402	.17	Check Dam				
2403	.18	Syphon				
2404	.2	Saluran Pengaman				
2405	.21	Saluran Banjir				
2406	.22	Saluran Drainage				
2407	.23	Corepure				
2408	.3	Bangunan lainnya				
2409	.31	Warning System				
2410	.32	Stasiun	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2411	.321	Stasiun Pengukur curah hujan				
2412	.322	Stasiun Pengukur Air				
2413	.323	Stasiun Pengukur Cuaca				
2414	.324	Stasiun Pos Penjagaan				
2415	615	Pengaman Pantai				
2416	.1	Tanggul				
2417	.2	K r i b				
2418	.3	Bangunan lainnya				
2419	616	Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)				
2420	.1	Stasiun Pompa				
2421	.2	Bangunan Pembawa				
2422	.3	Bangunan Pembuangan				
2423	.4	Bangunan lainnya				
2424	620	J A L A N	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2425	621	Jalan Kota / Kabupaten				
2426	.1	Daerah Penguasaan				
2427	.11	T a n a h				
2428	.12	Tanaman				
2429	.13	Bangunan				
2430	.2	Bangunan Sementara				
2431	.21	Jalan Sementara				
2432	.22	Jembatan Sementara				
2433	.23	Kantor Proyek				
2434	.24	Gedung Proyek				
2435	.25	Barak Kerja				
2436	.26	Laboratorium Lapangan				
2437	.27	R u m a h				
2438	.3	Badan Jalan				
2439	.31	Pekerjaan Tanah (earth work)				
2440	.32	Stabilisasi				
2441	.4	Perkerasan				
2442	.41	Lapisan Pondasi Bawah				
2443	.42	Lapisan Pondasi				
2444	.43	Lapisan Permukaan				
2445	.5	Drainage				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2446	.51	Parit Tanah				
2447	.52	Gorong-gorong (culvert)				
2448	.6	Buku Trotoir				
2449	.61	Tanah				
2450	.62	Perkerasan				
2451	.63	Pasangan				
2452	.7	M e d i u m				
2453	.71	T a n a h				
2454	.72	Tanaman	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2455	.73	Perkerasan				
2456	.74	Pasangan				
2457	.8	Daerah Sampingan				
2458	.81	Tanaman				
2459	.82	Pagar				
2460	.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman				
2461	.91	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas				
2462	.92	Lampu Penerangan				
2463	.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas				
2464	.94	Patok-patok KM				
2465	.95	Patok-patok R.O.W. (Sempadan)				
2466	.96	Rel Pengamanan				
2467	.97	P a g a r				
2468	.98	Turap Penahan				
2469	.99	Bronjong				
2470	622	Jalan Provinsi				
2471	1	Daerah Penguasaan				
2472	.11	Tanah				
2473	.12	Tanaman				
2474	.13	Bangunan				
2475	.14	Jalan Sementara				
2476	.15	Jembatan Sementara				
2477	.16	Kantor / Gedung Proyek				
2478	.17	Barak kerja				
2479	.18	Laboratorium lapangan				
2480	.19	Rumah				
2481	.2	Badan Jalan				
2482	.21	Pekerjaan Tanah (earth work)				
2483	.22	Stabilisasi				
2484	.3	Perkerasan (Pavement)				
2485	.31	Lapis Pondasi Bawah				
2486	.32	Lapis Pondasi				
2487	.33	Lapis Permukaan				
2488	.4	Drainage				
2489	.41	Parit				
2490	.42	Gorong-gorong (culvert)				
2491	.43	Buku Trotoir				
2492	.44	Tanah				
2493	.45	Perkerasan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2494	.5	Trotoir				
2495	.51	Tanah				
2496	.52	Perkerasan				
2497	.6	Medium				
2498	.61	Tanah	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2499	.62	Tanaman				
2500	.63	Perkerasan				
2501	.64	Pasangan				
2502	.7	Daerah Sampingan				
2503	.71	Tanaman				
2504	.72	Pagar				
2505	.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan				
2506	.81	Rambu-rambu				
2507	.82	Lampu Penerangan				
2508	.83	Lampu Pengaturan Lalu Lintas				
2509	.84	Patok-patok KM				
2510	.85	Patok-patok R.O.W. (Sempadan)				
2511	.86	Rel Pengamanan				
2512	.87	Pagar				
2513	.88	Turap Penahan				
2514	.89	Bronjong				
2515	.9	Bangunan Sementara				
2516	.91	Jalan Sementara				
2517	.92	Jembatan Sementara				
2518	.93	Kantor Proyek				
2519	.94	Gudang Proyek				
2520	.95	Barak Kerja				
2521	.96	Laboratorium Lapangan				
2522	.97	Rumah				
2523	623	Jalan Nasional				
2524	.1	Daerah Penguasaan				
2525	.2	Badan Jalan				
2526	.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)				
2527	.4	Drainase (gorong-gorong, parit)				
2528	.5	Median				
2529	.6	Daerah samping (pagar, tanaman)				
2530	.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)				
2531	630	JEMBATAN				
2532	631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten				
2533	.1	Daerah Penguasaan				
2534	.11	Tanah				
2535	.12	Tanaman				
2536	.13	Bangunan				
2537	.2	Bangunan Sementara				
2538	.21	Jalan Sementara				
2539	.22	Jembatan Sementara				
2540	.23	Kantor Proyek				
2541	.24	Gedung Proyek				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2542	.25	Barak kerja	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2543	.26	Laboratorium lapangan				
2544	.27	Rumah				
2545	.3	Pekerjaan Tanah (earth work)				
2546	.31	Galian Tanah				
2547	.32	Timbunan Tanah				
2548	.4	Pondasi				
2549	.41	Pondasi kepala jembatan				
2550	.42	Pondasi pilar				
2551	.43	Pondasi angker				
2552	.5	Bangunan bawah				
2553	.51	Kepala Jembatan				
2554	.52	Pilar				
2555	.53	Piloon				
2556	.54	Landasan				
2557	.6	Bangunan				
2558	.61	Gelagar				
2559	.62	Lantai				
2560	.63	Perkerasan				
2561	.64	Jalan orang / trotoir				
2562	.65	Sandaran				
2563	.66	Talang air				
2564	.7	Bangunan pengaman				
2565	.71	Turap/penahan				
2566	.72	Bronjong				
2567	.73	Strek Dam				
2568	.74	Kist Dam				
2569	.75	Coupute				
2570	.76	Krip				
2571	.8	Bangunan Pelengkap				
2572	.81	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas				
2573	.82	Patok pengamanan				
2574	.83	Patok R.O.W				
2575	.9	Oprit				
2576	.91	Badan				
2577	.92	Perkerasan				
2578	.93	Drainage				
2579	.94	Baku				
2580	.95	Mediun				
2581	632	Jembatan pada Jalan Provinsi				
2582	.1	Daerah Penguasaan				
2583	.11	Tanah				
2584	.12	Tanaman				
2585	.13	Bangunan				
2586	.2	Bangunan Sementara	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2587	.21	Jalan Sementara				
2588	.22	Jembatan Sementara				
2589	.23	Kantor Proyek				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2590	.24	Gedung Proyek				
2591	.25	Barak kerja				
2592	.26	Laboratorium lapangan				
2593	.27	Rumah				
2594	.3	Pekerjaan Tanah (earth work)				
2595	.31	Galian Tanah				
2596	.32	Timbunan Tanah				
2597	.4	Pondasi				
2598	.41	Pondasi kepala jembatan				
2599	.42	Pondasi Pilar				
2600	.43	Pondasi angker				
2601	.5	Bangunan bawah				
2602	.51	Kepala Jembatan				
2603	.52	Pilar				
2604	.53	Piloon				
2605	.54	Landasan				
2606	.6	Bangunan				
2607	.61	Gelagar				
2608	.62	Lantai				
2609	.63	Perkerasan				
2610	.64	Jalan orang / trotoir				
2611	.65	Sandaran				
2612	.66	Talang air				
2613	.7	Bangunan Pengaman				
2614	.71	Turap / Penahan				
2615	.72	Bronjong				
2616	.73	Strek Dam				
2617	.74	Kist Dam				
2618	.75	Coupute				
2619	.76	Krip				
2620	.8	Bangunan Pelengkap				
2621	.81	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas				
2622	.82	Patok pengamanan				
2623	.83	Patok R.O.W (sempadan)				
2624	.9	Oprit				
2625	.91	Badan				
2626	.92	Perkerasan				
2627	.93	Drainage				
2628	.94	Baku				
2629	.95	Mediun				
2630	633	Jembatan pada jalan Nasional	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2631	1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)				
2632	.2	Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek)				
2633	.3	Pondasi				
2634	.4	Bangunan bawah				
2635	.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)				
2636	.6	Bangunan Pengaman (bronjong strek dam, krib)				
2637	.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2638	640	BANGUNAN				
2639	641	Bangunan Pemerintah				
2640	.1	Gedung Pengadilan				
2641	.2	Rumah Pejabat Negara				
2642	.3	Gedung DPR				
2643	.4	Gedung Balai Kota				
2644	.5	Penjara				
2645	.6	Perkantoran				
2646	642	Bangunan Pendidikan				
2647	.1	Taman Kanak-kanak				
2648	.2	SD & Sekolah Menengah				
2649	.3	Perguruan Tinggi				
2650	643	Bangunan Rekreasi				
2651	.1	Bangunan Olah Raga				
2652	.2	Gedung Kesenian				
2653	.3	Gedung Pemancar				
2654	644	Bangunan Perdagangan				
2655	.1	Pusat Perbelanjaan				
2656	.2	Gedung Perdagangan				
2657	.3	B a n k				
2658	.4	Perkantoran				
2659	645	Bangunan Pelayanan Umum				
2660	.1	Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum				
2661	.2	Gedung Parkir				
2662	.3	Rumah Sakit				
2663	.4	Gedung Telkom				
2664	.5	Terminal Angkutan Umum				
2665	.6	Terminal Angkutan Air				
2666	.7	Terminal Angkutan Darat				
2667	.8	Bangunan Keagamaan				
2668	646	Bangunan Peninggalan Sejarah	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan
2669	.1	Monumen				
2670	.2	Candi				
2671	.3	Kraton				
2672	.4	Rumah Tradisional			Perangkat Daerah	
2673	647	Bangunan Industri	Terbatas	Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2674	648	Bangunan Tempat Tinggal				
2675	.1	Rumah Perkantoran				
2676	.11	.1 Inti / sederhana				
2677	.12	.2 Sedang / Mewah				
2678	.2	Rumah Pedesaan				
2679	.21	.1 Rumah Contoh				
2680	.3	Real Estate				
2681	649	Elemen Bangunan				
2682	.1	Pondasi				
2683	.11	.1 Diatas Tiang				
2684	.2	Dinding				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2685	.21	.1 Penahan beban				
2686	.22	.2 Tidak menahan beban				
2687	.3	A t a p				
2688	.4	Lantai / langit-langit				
2689	.41	.1 Suspended				
2690	.42	.2 Solit				
2691	.5	Pintu / Jendela				
2692	.51	.1 Pintu Hermonik				
2693	.52	.2 Pintu biasa				
2694	.53	.3 Pintu Sorong				
2695	.54	.4 Jendela Kayu				
2696	.55	.5 Jendela Sorong				
2697	.56	.6 Jendela Vertikal				
2698	650	TATA RUANG KOTA				
2699	651	Daerah Perdagangan / pelabuhan				
2700	.1	Daerah Pusat Perbelanjaan				
2701	.2	Daerah Perkantoran				
2702	652	Daerah Pemerintahan				
2703	653	Daerah Perumahan (site & servei)				
2704	.1	Kepadatan Rendah (low density)				
2705	.2	Kepadatan Tinggi (high density)				
2706	654	Daerah Industri				
2707	.1	Industri Berat				
2708	.2	Industri Ringan				
2709	.3	Industri Rumah (home industri)				
2710	655	Daerah Rekreasi (open spece)				
2711	.1	Publik Garden				
2712	.2	Sport & playing fields				
2713	.3	Open Space				
2714	656	Transportasi (tata letak)	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
2715	.1	Jaringan jalan				
2716	.11	.1 Penerangan Jalan				
2717	.2	Jaringan Kereta Api				
2718	.3	Jaringan Sungai	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2719	657	Assineering				
2720	.1	Saluran Pengumpulan				
2721	.2	Instansi Pengolahan				
2722	.21	.1 Bangunan				
2723	.22	.2 Bangunan Penyaring				
2724	.23	.3 Bangunan Penghancur Kotoran				
2725	.24	.4 Bangunan Pengendapan				
2726	.25	.5 Bangunan Pengering Lumpur				
2727	.26	.6 Unit Disinfektan				
2728	.27	.7 Unit Perpompaan				
2729	658	Kesehatan Lingkungan	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
2730	.1	Persampahan				
2731	.11	.1 Bangunan Pengumpulan				
2732	.12	.2 Bangunan Pemusnahan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2733	.2	Pengotoran Udara				
2734	.3	Pengotoran Air				
2735	.3	.1 Air Buangan Industri				
2736	.4	Kegaduhan				
2737	.5	Kebersihan kota				
2738	660	TATA LINGKUNGAN	Terbuka	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2739	1	Lingkungan Hidup				
2740	.2	Kebersihan Lingkungan				
2741	.3	Pencemaran				
2742	.31	.1 Pencemaran Air				
2743	.32	.2 Pencemaran Udara				
2744	.33	.3 Pencemaran Tanah				
2745	.34	.4 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)				
2746	661	Kerusakan Lingkungan				
2747	.1	Konservasi Pesisir dan Laut				
2748	.2	Konservasi Sumber Daya Alam				
2749	662	Pentataan Hukum Lingkungan				
2750	663	Laboratorium Lingkungan				
2751	.1	Air				
2752	.2	Udara				
2753	.3	Tanah				
2754	664	Analisis Dampak Lingkungan				
2755	665	Pengembangan Teknologi Lingkungan				
2756	666	Pengembangan Kapasitas				
2757	667	Pengamanan Lingkungan				
2758	668	Pusat Pertumbuhan				
2759	669	Daerah Hutan				
2760	670	KETENAGAAN	Terbatas	Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2761	.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)				
2762	671	Listrik				
2763	.1	Kelistrikan				
2764	.11	Perijinan				
2765	.12	Rekomendasi				
2766	.13	Pembinaan dan Pengawasan				
2767	.14	Kelistrikan PLN				
2768	.15	Kelistrikan non PLN				
2769	.2	Pembangkit Tenaga Listrik				
2770	.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air				
2771	.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel				
2772	.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas				
2773	.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari				
2774	.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir				
2775	.26	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi				
2776	.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap				
2777	.3	Transmisi Tenaga Listrik				
2778	.31	Gardu Induk / gardu penghubung / gardu trafo				
2779	.32	Saluran Udara Tenaga Listrik				
2780	.33	Kabel Bawah Tanah				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2781	.4	Distribusi Tenaga Listrik				
2782	.41	Gardu Distribusi				
2783	.42	Tegangan Menengah				
2784	.43	Tegangan Rendah				
2785	.44	Jaringan Bawah Tanah				
2786	.5	Pengusahaan Listrik				
2787	.51	Sambungan Listrik				
2788	.52	Penjualan Tenaga Listrik				
2789	.53	Tarif Listrik				
2790	672	Tenagan Air				
2791	673	Tenaga Minyak				
2792	674	Tenaga Gas				
2793	675	Tenaga Matahari				
2794	676	Tenaga Nuklir				
2795	677	Tenaga Panas Bumi				
2796	678	Tenaga Uap				
2797	679	Tenaga Lainnya				
2798	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, PDAM
2799	690	AIR MINUM				
2800	691	Intako				
2801	.1	Bromcaptering				
2802	.2	Sumur			kinerja Perangkat Daerah	
2803	.3	Bendungan				
2804	.4	Saringan (screen)				
2805	.5	Pintu air				
2806	.6	Saluran Pembawa				
2807	.7	Alat ukur				
2808	.8	Perpompaan				
2809	692	Transmisi Air Baku				
2810	.1	Perpipaan				
2811	.2	Katup Udara (Air Rolief)				
2812	.3	Tutup penguras (Blow oof)				
2813	.4	Bak Pelepas tekanan				
2814	.5	Jembatan pipa				
2815	.6	syphon				
2816	693	Instalasi Pengelolaan				
2817	.1	Bangunan Ukur				
2818	.2	Bangunan Aerasi				
2819	.3	Bangunan Pengendapan				
2820	.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia				
2821	.5	Bangunan Pengaduk				
2822	.6	Bangunan Saringan				
2823	.7	Perpompaan				
2824	.8	Clear Hell				
2825	694	Distribusi				
2826	.1	Reservoir menara bawah tanah				
2827	.1	.1 Menara				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2828	.1	.2 Reservoir menara bawah tanah				
2829	.2	Perpipaan				
2830	.3	Perpompaan				
2831	.4	Jembatan pipa				
2832	.5	syphon				
2833	.6	Hydran				
2834	.61	Hydran Umum				
2835	.62	Hydran Kebakaran				
2836	.7	Katup Udara (Air Rolief)				
2837	.71	Katup Udara (air relief)				
2838	.72	Katup pelepas (blow off)				
2839	.8	Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)				
2840	700	PENGAWASAN	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
2841	.1	Kebijakan dan program pengawasan				
2842	.2	Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek				
2843	701	Bidang Urusan Dalam				
2844	702	Bidang Peralatan				
2845	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
2846	.1	Pengawasan Inventarisasi Asset				
2847	704	Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi				
2848	.1	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen				
2849	705	Bidang Perencanaan				
2850	706	Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan				
2851	.1	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana				
2852	707	Bidang Penelitian				
2853	.1	Pengawasan Penelitian / Riset				
2854	708	Bidang Konferensi				
2855	.1	Pengawasan Pertahanan/ BPN				
2856	709	Bidang Perjalanan Dinas				
2857	.1	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi				
2858	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
2859	711	Bidang Pemerintahan Pusat				
2860	712	Pengawasan Pemerintahan Provinsi				
2861	713	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
2862	714	Pengawasan Pemerintahan Desa				
2863	715	Bidang MPR/DPR				
2864	716	Bidang DPRD Provinsi				
2865	717	Bidang DPRD Kabupaten/Kota				
2866	718	Bidang Hukum				
2867	719	Bidang Hubungan Luar Negeri				
2868	720	BIDANG POLITIK				
2869	721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll				
2870	722	Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam				
2871	723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh				
2872	724	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME				
2873	725	Bidang Pemuda				
2874	726	Bidang Pemilihan Umum				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2875	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN				
2876	731	Pengawasan Kesbangpolinmas				
2877	732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SAR)				
2878	733	Bidang Pertahanan				
2879	734	Bidang Kemiliteran				
2880	735	Bidang Perlindungan Masyarakat				
2881	736	Bidang Keamanan				
2882	737	Bidang Kejahatan				
2883	738	Bidang Bencana				
2884	739	Bidang Kecelakaan				
2885	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
2886	741	Pengawasan Pembangunan Desa				
2887	742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan				
2888	743	Pengawasan Kebudayaan	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
2889	744	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat				
2890	745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)				
2891	746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial				
2892	747	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi				
2893	748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran				
2894	749	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat				
2895	750	BIDANG PEREKONOMIAN				
2896	751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian				
2897	752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan				
2898	753	Pengawasan Kehutanan				
2899	754	Pengawasan Pertambangan / ESDM				
2900	755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan				
2901	756	Pengawasan Kenaga Kerja dan Ketransmigrasian				
2902	757	Pengawasan PMDN / PMA				
2903	758	Pengawasan Perbankan / Moneter				
2904	759	Pengawasan Kelautan dan Perikanan				
2905	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
2906	761	Pengawasan Pengairan				
2907	762	Pengawasan Jalan				
2908	763	Pengawasan Jembatan				
2909	764	Pengawasan Bangunan				
2910	765	Pengawasan Tata Ruang Kota				
2911	766	Pengawasan Tata Lingkungan				
2912	767	Pengawasan Ketenagaan				
2913	768	Pengawasan Air Minum				
2914	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK				
2915	771	Penyimpangan Pejabat Publik				
2916	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
2917	781	Bidang Pengadaan PNS				
2918	.1	Pengawasan Pengadaan PNS				
2919	.2	Persengketaan PNS				
2920	782	Bidang Mutasi Pegawai				
2921	783	Bidang Kedudukan Pegawai				
2922	.1	Penyimpangan Pejabat Publik				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2923	784	Bidang Kersejahteraan Pegawai				
2924	785	Bidang Cuti				
2925	786	Bidang Penilaian				
2926	.1	Pengawasan Penilaian dan Disiplin				
2927	787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian				
2928	.1	Keanggotaan PNS dan Parpol				
2929	790	BIDANG KEUANGAN				
2930	791	Bidang Anggaran				
2931	.1	Pengawasan Anggaran				
2932	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
2933	793	Bidang Verifikasi				
2934	794	Bidang Pembukuan				
2935	.1	Pengawasan Akuntansi				
2936	795	Bidang Perbendaharaan				
2937	1	Pengawasan Perbendaharaan				
2938	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan				
2939	.1	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah				
2940	797	Bidang Pendapatan				
2941	.1	Pengawasan Pendapatan				
2942	799	Bidang Bendaharaan				
2943	800	KEPEGAWAIAN Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2944	.1	Perencanaan				
2945	.2	Penelitian				
2946	.21	Pengaduan				
2947	.22	Tim				
2948	.23	Statistik				
2949	.24	Peraturan Perundang-undangan				
2950	810	PENGADAAN				
2951	811 .1	Pendaftaran CPNS				
2952	.2	Testing				
2953	.3	Screening				
2954		Pengumuman tes dan Pemanggilan				
2955	812	Pengujian Kesehatan				
2956	813 .1	Pengangkatan CPNS				
2957	.2	Pengangkatan CPNS Golongan I				
2958	.3	Pengangkatan CPNS Golongan II				
2959		Pengangkatan CPNS Golongan III				
2960	814	Pengangkatan Tenaga Lepas				
2961	.1	Pengankatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak				
2962	.2	Pengangkatan Tenaga Harian				
2963	.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan				
2964	820	MUTASI				
2965	821 .1	Pengangkatan				
2966	.11	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
2967	.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I				
2968	.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II				
2969	.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2970	.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV				
2971	.16	Pengangkatan Kembali PegawaiNegeri Sipil yang Cuti diluar Tanggungan				
2972	.21	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita				
2973	.22	Eselon 1				
2974	.23	Eselon 2				
2975	.24	Eselon 3	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2976	.3	Eselon 4				
2977		Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara,				
2978	822 .1	Kenaikan Gaji Berkala				
2979	.2	PNS Golongan I				
2980	.3	PNS Golongan II				
2981	.4	PNS Golongan III				
2982		PNS Golongan IV				
2983	823 .1	Kenaikan Pangkat				
2984	.2	PNS Golongan I				
2985	.3	PNS Golongan II				
2986	.4	PNS Golongan III				
2987		PNS Golongan IV				
2988	824 .1	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan				
2989	.2	PNS Golongan I				
2990	.3	PNS Golongan II				
2991	.4	PNS Golongan III				
2992	.5	PNS Golongan IV				
2993		Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)				
2994	825	Datasering dan Penempatan Kembali				
2995	826	Penunjukan Tugas Belajar				
2996	.1	Dalam Negeri				
2997	.2	Luar Negeri				
2998	.3	Tunjangan Belajar				
2999	.4	Penemnpatan Kembali				
3000	827	Wajib Militer				
3001	828	Mutasi Pegawai Instansi Lainnya				
3002	830	KEDUDUKAN				
3003		Peninjauan Masa Kerja				
3004	831	Perhitungan Masa Kerja				
3005	832	Penyesuaian Perangkat / Gaji				
3006	.1	PNS Golongan I				
3007	.2	PNS Golongan II				
3008	.3	PNS Golongan III				
3009	.4	PNS Golongan IV				
3010	833	Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)				
3011	834	Penghargaan Lainnya				
3012	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
3013	841 .1	Tunjangan				
3014	.2	Struktural dan Fungsional				
3015	.3	Kehormatan				
3016	.4	Dana Kematian (uang duka)				
3017	.5	Tambahan Penghasilan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3018		Tunjangan Cacat				
3019	842	D a n a	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3020	.1	Taspen				
3021	.2	Akses, Bantuan kesehatan				
3022	.3	Bantuan Pendidikan				
3023	843	Perawatan Kesehatan				
3024	.1	Poliklinik, Klinik Konsultasi				
3025	.2	Perawatan Dokter				
3026	.3	Obat-obatan				
3027	.4	Keluarga Berencana				
3028	844	Koperasi				
3029	.1	Distribusi Pangan				
3030	.2	Distribusi Sandang				
3031	.3	Distribusi Lainnya				
3032	845	Perumahan PNS				
3033	.1	Perumahan Pegawai				
3034	.2	Tanah Kampling				
3035	.3	Losmen/Hotel				
3036	846	Bantuan Sosial				
3037	.1	Bantuan Kebakaran				
3038	.2	Bantuan Kebanjiran				
3039	847	Rekreasi				
3040	848	Dispensasi				
3041	850	C U T I				
3042	851	Cuti Tahunan				
3043	852	Cuti Besar				
3044	853	Cuti Sakit				
3045	854	Cuti Hamil				
3046	855	Cuti Naik Haji				
3047	856	Cuti Diluar Tanggungan Negara				
3048	857	Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting				
3049	860	PENILAIAN				
3050	861	Penghargaan				
3051	.1	Bintang / Satyalencana Karya Satya				
3052	.2	Kenaikan Pangkat Anumerta				
3053	.3	Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat				
3054	.4	Pegawai Teladan				
3055	862	Hukuman				
3056	.1	Teguran Peringatan				
3057	.2	Penundaan Kenaikan Gaji				
3058	.3	Penurunan Pangkat				
3059	.4	Pemindahan				
3060	.5	Ringan				
3061	.6	Sedang				
3062	.7	Berat				
3063	863	Konduite / DP3	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3064	864	Ujian Dinas				
3065	.1	Tingkat I				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3066	.2	Tingkat II			Perangkat Daerah	
3067	.3	Tingkat 3				
3068	865	Penilaian Kinerja				
3069	.1	Struktural				
3070	.2	Fungsional				
3071	866	Rehabilitasi				
3072	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
3073	871	Formasi				
3074	872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian				
3075	873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian				
3076	.1	NIP				
3077	.2	KARPEG				
3078	.3	Legitimasi / Tanda Pengenal				
3079	.4	Daftar Keluarga				
3080	.5	KARSU / KARIS				
3081	874	Daftar Riwayat Pekerjaan				
3082	1	Tanggal Lahir				
3083	.2	Penggantian Nama				
3084	.3	Izin Kepartaian/Organisasi				
3085	876	Kewenangan Mutasi Kepegawaian				
3086	.1	Pelimpahan Wewenangan				
3087	.2	Spesimen Tanda Tangan				
3088	877	Penggajian				
3089	.1	SKPP				
3090	878	Sumpah/Janji				
3091	878	Korps Kepegawaian				
3092	880	PEMBERHENTIAN				
3093	881	Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri				
3094	882	Dengan Hak Pensiun				
3095	.1	Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. I				
3096	.2	Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. II				
3097	.3	Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. III				
3098	.4	Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV				
3099	.5	Pensiun Janda / Duda				
3100	.6	Pensiun Yatim Piatu				
3101	.7	Uang muka Pensiun				
3102	883	Karena Meninggal				
3103	884	Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani				
3104	885	Uang Pesangon				
3105	886	Uang Tunggu				
3106	887	Uang Sementara Waktu	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3107	.1	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas				
3108	888	Tidak dengan Hormat				
3109	.1	Tali Asih Pensiun				
3110	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
3111	891	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat				
3112	892	Pendidikan Prajabatan				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3113	893	Pendidikan dalam Jabatan				
3114	.1	Diklatpim				
3115	.2	Diklat Teknis				
3116	.3	Diklat Fungsional				
3117	.4	Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis				
3118	894	Pengembangan Pegawai				
3119	.1	Tugas Belajar				
3120	.2	Ijin Belajar				
3121	.3	Tunjangan Belajar				
3122	.4	Bantuan Pendidikan				
3123	.5	Penempatan Kembali				
3124	895	Metode				
3125	.1	Kuliah				
3126	.2	Ceramah, Symposium				
3127	.3	Diskusi				
3128	.4	Kuliah Lapangan / OL, Widya Wasta, KKN				
3129	.5	Kurikulum				
3130	.6	Karya Tulis				
3131	896	Tenaga Pengajar, Narasumber				
3132	897	Administrasi Pendidikan				
3133	898	Fasilitas Pendidikan				
3134	.1	Tunjangan Belajar				
3135	.2	Asrama				
3136	.3	Uang Makan				
3137	.4	Uang Transport				
3138	.5	Uang Buku				
3139	.6	Uang Ujian				
3140	.7	Uang Semester/Uang Kuliah				
3141	.8	Uang Saku				
3142	899	Sarana Pendidikan				
3143	.1	Bantuan Sarana Belajar				
3144	.2	Bantuan Alat Tulis				
3145	.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya				
3146	900	KEUANGAN	Terbatas	Eselon II,	Informasinya memiliki	Badan Pengelolaan
3147	901	Nota Keuangan		Eselon III,	dampak	
3148	902	APBN		Eselon IV	yang dapat	Keuangan dan Aset
3149	903	APBD			mengganggu kinerja	Daerah
3150	904	Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	
3151	905	Dana Alokasi Khusus				
3152	910	ANGGARAN				
3153	911	Keputusan ttg penunjukkan pengelola keuangan SKPD / PPKD				
3154	912	Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat				
3155	913	DPA / DPPA / DPAL - SKPD / PPKD				
3156	914	Anggaran Kas				
3157	915	Surat Penyediaan Dana (SPD)				
3158	916	Rutin				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3159	917	Pembangunan				
3160	918	Daftar Isi Kegiatan (DIK)				
3161	.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)				
3162	919	Daftar Isian Proyek				
3163	.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)				
3164	.2	Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)				
3165	920	OTORISASI/SKO				
3166	921	Rutin				
3167	922	Pembangunan				
3168	923	SUP				
3169	924	Ralat SKO				
3170	930	AKUNTANSI				
3171	931	Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				
3172	940	PERBENDAHARAAN				
3173	941	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				
3174	942	Surat Penolakan Penerbitan SP2D				
3175	943	Daftar Penguji SP2D				
3176	950	PEMBINAAN PERBENDAHARAAN				
3177	951	Bintek-bintek / Kursus yang berkaitan dengan Keuangan				
3178	960	PENGELOLAAN KAS DAERAH				
3179	961	Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji				
3180	962	Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah				
3181	963	Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN / PPh) dari CV / PT / Instansi				
3182	964	Surat Tanda Setoran (STS)				
3183	965	Laporan Realisasi Daerah				
3184	.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah				
3185	.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah				
3186	966	Rekonsiliasi				
3187	.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan				
3188	.2	Laporan Rekonsiliasi Bank				
3189	967	Laporan Mutasi Penempatan Deposito				
3190	968	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3191	970	EVALUASI DAN PENGENDALIAN				
3192	971	Tuntutan Ganti Rugi				
3193	972	Tuntutan Perbendaharaan				
3194	973	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota				
3195	974	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota				
3196	975	Edaran -edaran				
3197	980	PENDAPATAN	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3198	981	Perimbangan Keuangan				
3199	.1	Bagi Hasil Pajak				
3200		.1 Pajak Bumi Bangunan (PBB)				
3201		.2 Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)				
3202		.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)				
3203	.2	Bagi Hasil Bukan Pajak				
3204		.1 Sumber Daya Alam / Migas				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3205	982	Subsidi				
3206	983	Pajak				
3207	.1	Pajak Kendaraan Bermotor				
3208	.2	Pajak Kendaraan Diatas Air				
3209	.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
3210	.4	Pajak Pengembalian & Pemanfaaatan Air Permukaan				
3211	.5	Pajak Reklame				
3212	984	Restribusi				
3213	.1	Restribusi Bidang Kesehatan				
3214	.2	Restribusi bidang seni budaya dan pariwisata				
3215	.3	Restribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk				
3216	.4	Restribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)				
3217	.5	Restribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk				
3218	.6	Restribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil				
3219	.7	Restribusi bidang perikanan dan kelautan				
3220	.8	Restribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi				
3221	.9	Restribusi bidang lainnya (termasuk sampah)				
3222	985	Bea				
3223	.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
3224	.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air				
3225	986	Cukai				
3226	987	Pungutan				
3227	988	Bantuan				
3228	.1	Bantuan Presiden				
3229	.2	Bantuan Menteri				
3230	.3	Bantuan Gubernur				
3231	.4	Bantuan Bupati				
3232	.5	Bantuan Lainnya	Terbatas	Eselon II, Eselon III, Eselon IV	Informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3233	989	Pendapatan Lainnya				
3234	.1	Hasil Penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
3235	.11	Pelepasan Hak Atas Tanah				
3236	.12	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas				
3237	.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2				
3238	.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4				
3239	.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris				
3240	.16	Penjualan Drum Bekas				
3241	.17	Penjualan Hasil Penerbangan Pohon				
3242	.2	Penerimaan Jasa Giro				
3243	.21	Jasa Giro Kas Daerah				
3244	.22	Jasa Giro Pemegang Kas				
3245	.23	Jasa Giro Khusus				
3246	.3	Penerimaan Bunga Bank				
3247	.31	Bunga Deposito				
3248	.32	Bunga Tabungan				
3249	.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-				
3250	.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga				

NO.	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3251	.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)				
3252	.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu				
3253	.5	Penerimaan Lain-lain				
3254	.51	Penerimaan kembali kredit BKK				
3255	.52	Ternak tidak layak bibit				
3256	.53	Sewa Internet				
3257	.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving				
3258	.55	Kerjasama Dengan BUMIDA				
3259	.56	Penerimaan DUKS				
3260	.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan				
3261	.58	Setoran TP-TGR				
3262	.59	Penerimaan Lainnya dari setda / SKPD				

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ